



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.103, 2021

KEMENKUMHAM.  
Pencabutan.

Tunjangan

Kinerja.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian tunjangan kinerja dengan menyesuaikan jabatan dan kelas jabatan baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur mengenai prosedur pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 272);
  5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  6. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 274);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2015 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1412);
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1507);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan pegawai lain yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan

organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
5. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
6. Jam Kerja adalah rentang waktu Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali mengikuti sekolah kedinasan.
8. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
11. Wakil Menteri adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan tugas Kementerian.

#### Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah periode tanggal 23 bulan berjalan sampai dengan tanggal 22 bulan berikutnya.

### BAB II

#### KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

#### Pasal 3

- (1) Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:
  - a. penilaian Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai;
  - b. target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP;
  - c. kehadiran menurut hari dan Jam Kerja di lingkungan Kementerian serta cuti yang akan dilaksanakan oleh Pegawai; dan
  - d. Pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan sesuai dengan ketentuan Jam Kerja pada mesin pencatat kehadiran secara elektronik di unit kerja masing-masing.
- (2) Perhitungan penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 5

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang merangkap jabatan administrator atau pengawas di lingkungan Kementerian, hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.

## BAB III

## HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

## Pasal 6

- (1) Hari dan Jam Kerja Pegawai di lingkungan Kementerian ditentukan sebagai berikut:
  - a. pukul 07.30-16.00 waktu setempat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis;
  - b. pukul 07.30-16.30 waktu setempat pada hari Jumat;
  - c. pukul 12.00-13.00 waktu setempat untuk istirahat pada hari Senin sampai dengan hari Kamis; dan
  - d. pukul 11.30-13.00 waktu setempat untuk istirahat pada hari Jumat.
- (2) Pegawai yang melaksanakan tugas di luar hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. penugasan kepala kantor/Eselon II
  - b. keputusan pimpinan unit kerja untuk Pegawai yang bertugas sebagai penjaga tahanan/deteni/layanan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan/Rumah

Tahanan/Rumah Detensi Imigrasi/Kantor Imigrasi  
Tempat Pemeriksaan Imigrasi; atau

- c. hari dan Jam Kerja tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar atau pendidikan kedinasan.
- (3) Penentuan hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat izin Tugas Belajar dari unit kerja atau institusi tempat kegiatan tersebut diselenggarakan.
- (4) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan masuk kerja sampai dengan pukul 08.00 atau 30 (tiga puluh) menit dari jadwal Jam Kerja yang telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) maka Pegawai yang bersangkutan wajib mengganti waktu keterlambatan selama 30 (tiga puluh) menit pada hari yang sama.
- (2) Pegawai yang telah mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (3) Penggantian waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) bulan berjalan.

#### Pasal 8

Pegawai yang melakukan pelanggaran kehadiran menurut hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. terlambat masuk kerja;
- b. pulang sebelum waktunya;
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan/atau
- d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada Jam Kerja.

BAB IV  
PEMOTONGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA  
BAGI PEGAWAI

Pasal 9

Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jabatan pelaksana atau jabatan fungsional sampai dengan calon PNS yang bersangkutan diangkat sebagai PNS.

Pasal 10

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.
- (2) Tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan:
  - a. perintah kedinasan;
  - b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian;
  - c. peraturan kedinasan;
  - d. tata tertib di lingkungan kantor; atau
  - e. standar prosedur kerja (*Standar Operating Procedure/SOP*).

Pasal 11

- (1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setelah pembebasan tugas.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dalam jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. program Diploma I (D-1) paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. program Diploma II (D-2) paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. program Diploma III (D-3) paling lama 3 (tiga) tahun;

- d. program Diploma IV (D-4)/Strata I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
  - e. program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun); dan
  - f. program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun (2 (dua) semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan/atau instansi.
- (4) Dalam hal Pegawai melaksanakan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya setelah pembebasan tugas.

#### Pasal 12

Dalam hal Pegawai tidak masuk kerja tanpa keterangan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 5% (lima per seratus) per hari.

#### Pasal 13

Bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja pada periode berjalan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada periode berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) untuk setiap kali terlambat;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap kali terlambat;
- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua lima per seratus) untuk setiap kali terlambat; dan

- d. dalam rentang waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap kali terlambat.

#### Pasal 14

Pegawai yang tidak memenuhi penggantian Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan potongan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus).

#### Pasal 15

Bagi Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada periode berjalan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada periode berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya;
- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya; dan
- d. dalam rentang waktu lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya.

#### Pasal 16

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan atau cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus);
  - b. Pegawai yang melaksanakan cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
    1. periode pembayaran bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
    2. periode pembayaran bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); dan
    3. periode pembayaran bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh per seratus).
- (2) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

#### Pasal 17

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, Tunjangan Kinerja dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari terhitung sejak tanggal cuti alasan penting.

#### Pasal 18

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan anak pertama sampai dengan kedua, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus); dan
- b. Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan anak ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut:
  1. sebesar 60% (enam puluh per seratus) untuk periode pembayaran bulan pertama;
  2. sebesar 30% untuk periode pembayaran bulan kedua (tiga puluh per seratus); dan
  3. sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk periode pembayaran bulan ketiga.

## Pasal 19

- (1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus);
  - b. sakit selama 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) bulan dipotong sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari; dan
  - c. sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dibayarkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) per hari.
- (2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - b. surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat yang menangani bidang kepegawaian dalam waktu paling lama:
  - a. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah sembuh dari sakit, untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
  - b. 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama mulai cuti untuk cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

## Pasal 20

- (1) Bagi Pegawai yang memiliki izin dan alasan yang sah, potongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15, hanya dikenakan 50% (lima puluh per seratus) dari besaran potongan Tunjangan Kinerja yang seharusnya dikenakan.

- (2) Izin atau alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan cara mengajukan permohonan izin kepada atasan langsung untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Permohonan izin yang telah disetujui oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada pejabat yang menangani bidang kepegawaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hari pertama masuk kerja setelah melaksanakan izin.
- (4) Format surat permohonan izin, surat keterangan, dan laporan rincian pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### PENCATATAN DAN PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Pencatatan nilai capaian SKP dilaksanakan oleh pejabat penilai paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan setiap akhir Desember pada tahun yang bersangkutan atau paling lama akhir Januari tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan kehadiran dan pelaksanaan cuti Pegawai dilakukan setiap bulan dengan periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan pejabat pengawas, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas;
- (2) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat pelaksana, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya

dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan jabatan bagi pejabat fungsional, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan terhitung sejak tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 23

- (1) Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.
- (2) Wakil Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 135% (seratus tiga puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian.

#### Pasal 24

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja Menteri, Wakil Menteri dan Pegawai dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1807), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN  
 KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KELAS JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. DAFTAR NAMA JABATAN MENTERI DAN BESARAN TUNJANGAN  
 KINERJA

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	MENTERI	49.860.000

B. DAFTAR NAMA JABATAN WAKIL MENTERI DAN BESARAN TUNJANGAN  
 KINERJA

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	WAKIL MENTERI	44.874.000

C. DAFTAR NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR,  
 DAN JABATAN PENGAWAS, KELAS JABATAN, DAN BESARAN  
 TUNJANGAN KINERJA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	SEKRETARIS JENDERAL	17	33.240.000
2	KEPALA BIRO PERENCANAAN	15	19.280.000
3	KEPALA BAGIAN REFORMASI BIROKRASI	12	9.896.000
4	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	REFORMASI BIROKRASI		
5	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI DAN SOSIALISASI REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
6	KEPALA SUBBAGIAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
7	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
8	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	12	9.896.000
9	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN I	9	5.079.200
10	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN II	9	5.079.200
11	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN III	9	5.079.200
12	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN IV	9	5.079.200
13	KEPALA BAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS DAN PELAPORAN	12	9.896.000
14	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN I	9	5.079.200
15	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN II	9	5.079.200
16	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN III	9	5.079.200
17	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN, ANALISIS, DAN PELAPORAN IV	9	5.079.200
18	KEPALA BAGIAN KELEMBAGAAN	12	9.896.000
19	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN I	9	5.079.200
20	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN II	9	5.079.200
21	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS, PENATAAN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN III	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
22	KEPALA BAGIAN TATA LAKSANA	12	9.896.000
23	KEPALA SUBBAGIAN STANDARDISASI SARANA KERJA	9	5.079.200
24	KEPALA SUBBAGIAN SISTEM, PROSEDUR, DAN METODA	9	5.079.200
25	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS TATA LAKSANA	9	5.079.200
26	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	5.079.200
27	KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN	15	19.280.000
28	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
29	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PENEMPATAN PEGAWAI	9	5.079.200
30	KEPALA SUBBAGIAN SELEKSI PEGAWAI	9	5.079.200
31	KEPALA SUBBAGIAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
32	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN ARSIP PEGAWAI	9	5.079.200
33	KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR PEGAWAI	12	9.896.000
34	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KARIER	9	5.079.200
35	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI	9	5.079.200
36	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL I	9	5.079.200
37	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL II	9	5.079.200
38	KEPALA BAGIAN MUTASI PEGAWAI	12	9.896.000
39	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRASI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
40	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI JABATAN FUNGSIONAL I	9	5.079.200
41	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI JABATAN FUNGSIONAL II	9	5.079.200
42	KEPALA SUBBAGIAN KEPANGKATAN DAN PENSIUN	9	5.079.200
43	KEPALA BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI	12	9.896.000
44	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI I	9	5.079.200
45	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI II	9	5.079.200
46	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI III	9	5.079.200
47	KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN PEGAWAI IV	9	5.079.200
48	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	12	9.896.000
49	KEPALA SUBBAGIAN PERIZINAN, KONSULTASI, DAN PERLINDUNGAN PEGAWAI	9	5.079.200
50	KEPALA SUBBAGIAN JAMINAN SOSIAL DAN PEMBEKALAN PURNA BAKTI	9	5.079.200
51	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	5.079.200
52	KEPALA BIRO KEUANGAN	15	19.280.000
53	KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	12	9.896.000
54	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN I	9	5.079.200
55	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN II	9	5.079.200
56	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN III	9	5.079.200
57	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN IV	9	5.079.200
58	KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
59	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN I	9	5.079.200
60	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN II	9	5.079.200
61	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA KEUANGAN III	9	5.079.200
62	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	5.079.200
63	KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN	12	9.896.000
64	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN I	9	5.079.200
65	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN II	9	5.079.200
66	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN III	9	5.079.200
67	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN IV	9	5.079.200
68	KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	12	9.896.000
69	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN I	9	5.079.200
70	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN II	9	5.079.200
71	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN III	9	5.079.200
72	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN IV	9	5.079.200
73	KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	15	19.280.000
74	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA DAN TATA USAHA BIRO	12	9.896.000
75	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA I	9	5.079.200
76	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA II	9	5.079.200
77	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA III	9	5.079.200
78	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	5.079.200
79	KEPALA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	BARANG MILIK NEGARA		
80	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN	9	5.079.200
81	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN	9	5.079.200
82	KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	9	5.079.200
83	KEPALA BAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA	12	9.896.000
84	KEPALA SUBBAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA I	9	5.079.200
85	KEPALA SUBBAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA II	9	5.079.200
86	KEPALA SUBBAGIAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA III	9	5.079.200
87	KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	12	9.896.000
88	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA I	9	5.079.200
89	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA II	9	5.079.200
90	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA III	9	5.079.200
91	KEPALA BAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	12	9.896.000
92	KEPALA SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA I	9	5.079.200
93	KEPALA SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA II	9	5.079.200
94	KEPALA SUBBAGIAN PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA III	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
95	KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, HUKUM, DAN KERJASAMA	15	19.280.000
96	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI	12	9.896.000
97	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA LEMBAGA PEMERINTAH	9	5.079.200
98	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA LEMBAGA NONPEMERINTAH	9	5.079.200
99	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	5.079.200
100	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	12	9.896.000
101	KEPALA SUBBAGIAN PELIPUTAN DAN PENYAJIAN BERITA	9	5.079.200
102	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN PERS DAN MEDIA MASSA	9	5.079.200
103	KEPALA SUBBAGIAN ARSIP DAN DOKUMENTASI	9	5.079.200
104	KEPALA BAGIAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	12	9.896.000
105	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA BILATERAL	9	5.079.200
106	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA REGIONAL	9	5.079.200
107	KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA MULTILATERAL	9	5.079.200
108	KEPALA BAGIAN LAYANAN ADVOKASI HUKUM	12	9.896.000
109	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM KEMENTERIAN	9	5.079.200
110	KEPALA SUBBAGIAN ADVOKASI HUKUM KEMENTERIAN	9	5.079.200
111	KEPALA BIRO UMUM	15	19.280.000
112	KEPALA BAGIAN TATA USAHA KEMENTERIAN	12	9.896.000
113	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN	9	5.079.200
114	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS	9	5.079.200
115	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF	9	5.079.200
116	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
117	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	12	9.896.000
118	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI	9	5.079.200
119	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA WAKIL MENTERI	9	5.079.200
120	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIS JENDERAL	9	5.079.200
121	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI	9	5.079.200
122	KEPALA BAGIAN BINA SIKAP MENTAL DAN LAYANAN KESEHATAN	12	9.896.000
123	KEPALA SUBBAGIAN BINA SIKAP MENTAL PEGAWAI	9	5.079.200
124	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN KESEHATAN PEGAWAI	9	5.079.200
125	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA	12	9.896.000
126	KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM	9	5.079.200
127	KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	9	5.079.200
128	KEPALA SUBBAGIAN GAJI DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI	9	5.079.200
129	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL	9	5.079.200
130	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN PENGAMANAN	12	9.896.000
131	KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN	9	5.079.200
132	KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN	9	5.079.200
133	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN PIMPINAN	9	5.079.200
134	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN, INSTALASI, DOKUMEN, DAN JALUR INFORMASI	9	5.079.200
135	KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	15	19.280.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
136	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	12	9.896.000
137	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
138	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
139	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	9	5.079.200
140	KEPALA BIDANG STANDARDISASI DAN KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI	12	9.896.000
141	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
142	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
143	KEPALA SUBBIDANG KERJA SAMA DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
144	KEPALA BIDANG DATA DAN PENGAMANAN JARINGAN	12	9.896.000
145	KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	9	5.079.200
146	KEPALA SUBBIDANG PENGAMANAN DATA DAN JARINGAN	9	5.079.200
147	KEPALA SUBBIDANG PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
148	INSPEKTUR JENDERAL	17	33.240.000
149	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	15	19.280.000
150	KEPALA BAGIAN PROGRAM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PELAPORAN	12	9.896.000
151	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
152	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
153	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
154	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
155	KEPALA BAGIAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN	12	9.896.000
156	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
157	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA HASIL PENGAWASAN I	9	5.079.200
158	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DAN ANALISIS DATA HASIL PENGAWASAN II	9	5.079.200
159	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADUAN	9	5.079.200
160	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
161	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
162	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200
163	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
164	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS	9	5.079.200
165	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
166	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN ARSIP	9	5.079.200
167	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
168	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
169	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
170	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
171	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
172	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN	9	5.079.200
173	INSPEKTUR WILAYAH I	15	19.280.000
174	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH I	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
175	INSPEKTUR WILAYAH II	15	19.280.000
176	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH II	9	5.079.200
177	INSPEKTUR WILAYAH III	15	19.280.000
178	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH III	9	5.079.200
179	INSPEKTUR WILAYAH IV	15	19.280.000
180	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH IV	9	5.079.200
181	INSPEKTUR WILAYAH V	15	19.280.000
182	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH V	9	5.079.200
183	INSPEKTUR WILAYAH VI	15	19.280.000
184	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT WILAYAH VI	9	5.079.200
185	DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI	17	33.240.000
186	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	15	19.280.000
187	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
188	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN WILAYAH I	9	5.079.200
189	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN WILAYAH II	9	5.079.200
190	KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KELEMBAGAAN	9	5.079.200
191	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI, PELAPORAN, DAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
192	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
193	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
194	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	5.079.200
195	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
196	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
197	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
198	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN TATA USAHA KEUANGAN	9	5.079.200
199	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	9	5.079.200
200	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
201	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN	12	9.896.000
202	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
203	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
204	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN	9	5.079.200
205	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM	12	9.896.000
206	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
207	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN KEPUSTAKAAN	9	5.079.200
208	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
209	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
210	DIREKTUR LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
211	KEPALA SUBDIREKTORAT VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN	12	9.896.000
212	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN WILAYAH I	9	5.079.200
213	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN WILAYAH II	9	5.079.200
214	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DOKUMEN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PERJALANAN WILAYAH III		
215	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DAN ANALISIS DOKUMEN PERJALANAN	12	9.896.000
216	KEPALA SEKSI PERENCANAAN, ANALISIS KEBUTUHAN DAN STANDARDISASI DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
217	KEPALA SEKSI PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
218	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
219	KEPALA SUBDIREKTORAT VISA	12	9.896.000
220	KEPALA SEKSI PERENCANAAN, ANALISIS KEBUTUHAN, DAN STANDARDISASI VISA	9	5.079.200
221	KEPALA SEKSI VISA KUNJUNGAN	9	5.079.200
222	KEPALA SEKSI VISA TINGGAL TERBATAS	9	5.079.200
223	KEPALA SEKSI VISA NEGARA TERTENTU	9	5.079.200
224	KEPALA SUBDIREKTORAT TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	12	9.896.000
225	KEPALA SEKSI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PELABUHAN LAUT	9	5.079.200
226	KEPALA SEKSI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BANDAR UDARA	9	5.079.200
227	KEPALA SEKSI POS LINTAS BATAS DAN TEMPAT LAIN	9	5.079.200
228	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
229	DIREKTUR IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
300	KEPALA SUBDIREKTORAT IZIN TINGGAL	12	9.896.000
301	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL NEGARA TERTENTU	9	5.079.200
302	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TERBATAS	9	5.079.200
303	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL TETAP	9	5.079.200
304	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DARURAT DAN KEADAAN TERPAKSA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
305	KEPALA SUBDIREKTORAT ALIH STATUS IZIN TINGGAL	12	9.896.000
306	KEPALA SEKSI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TERBATAS	9	5.079.200
307	KEPALA SEKSI ALIH STATUS IZIN TINGGAL TETAP	9	5.079.200
308	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
309	KEPALA SUBDIREKTORAT STATUS KEIMIGRASIAN DAN KEWARGANEGARAAN	12	9.896.000
310	KEPALA SEKSI PENELAAHAN STATUS	9	5.079.200
311	KEPALA SEKSI SURAT KETERANGAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
312	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
313	DIREKTUR INTELIJEN KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
314	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYELIDIKAN DAN OPERASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
315	KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
316	KEPALA SEKSI OPERASI INTELIJEN WILAYAH I	9	5.079.200
317	KEPALA SEKSI OPERASI INTELIJEN WILAYAH II	9	5.079.200
318	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
319	KEPALA SEKSI PENGAMANAN KANTOR DAN INSTALASI VITAL	9	5.079.200
320	KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERSONIL, MATERIAL, DAN DOKUMEN	9	5.079.200
321	KEPALA SEKSI PENGAMANAN PERIZINAN	9	5.079.200
322	KEPALA SUBDIREKTORAT PRODUKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
323	KEPALA SEKSI PRODUKSI KEGIATAN INTELIJEN	9	5.079.200
324	KEPALA SEKSI PERKIRAAN KEADAAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	INTELJEN		
325	KEPALA SEKSI LABORATORIUM FORENSIK KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
326	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA INTELJEN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
327	KEPALA SEKSI KERJA SAMA LEMBAGA INTELJEN	9	5.079.200
328	KEPALA SEKSI BIMBINGAN JARINGAN NON LEMBAGA	9	5.079.200
329	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
330	DIREKTUR PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
331	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAWASAN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
332	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN WILAYAH I	9	5.079.200
333	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KEIMIGRASIAN WILAYAH II	9	5.079.200
334	KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL	9	5.079.200
335	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
336	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH I	9	5.079.200
337	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN WILAYAH II	9	5.079.200
338	KEPALA SEKSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	5.079.200
339	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN	12	9.896.000
340	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN	9	5.079.200
341	KEPALA SEKSI PENANGKALAN	9	5.079.200
342	KEPALA SUBDIREKTORAT DETENSI IMIGRASI DAN DEPORTASI	12	9.896.000
343	KEPALA SEKSI DETENSI IMIGRASI	9	5.079.200
344	KEPALA SEKSI DEPORTASI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
345	KEPALA SEKSI IMIGRAN ILEGAL	9	5.079.200
346	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
347	DIREKTUR KERJA SAMA KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
348	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARLEMBAGA	12	9.896.000
349	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARLEMBAGA PEMERINTAH	9	5.079.200
350	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN ANTARLEMBAGA NONPEMERINTAH	9	5.079.200
351	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJASAMA KEIMIGRASIAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL	12	9.896.000
352	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9	5.079.200
353	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL NON PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9	5.079.200
354	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJASAMA KEIMIGRASIAN ANTARNEGARA	12	9.896.000
355	KEPALA SEKSI KERJASAMA KEIMIGRASIAN BILATERAL	9	5.079.200
356	KEPALA SEKSI KERJASAMA KEIMIGRASIAN MULTILATERAL	9	5.079.200
357	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA KEIMIGRASIAN PERWAKILAN ASING DAN BINA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA	12	9.896.000
358	KEPALA SEKSI KERJA SAMA KEIMIGRASIAN DENGAN PERWAKILAN NEGARA ASING	9	5.079.200
359	KEPALA SEKSI BINA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA WILAYAH I	9	5.079.200
360	KEPALA SEKSI BINA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA WILAYAH II	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
361	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
362	DIREKTUR SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	15	19.280.000
363	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	12	9.896.000
364	KEPALA SEKSI PERENCANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
365	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
366	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
367	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN	12	9.896.000
368	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH I	9	5.079.200
369	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH II	9	5.079.200
370	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN WILAYAH III	9	5.079.200
371	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
372	KEPALA SEKSI KERJA SAMA TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
373	KEPALA SEKSI PEMANFAATAN INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
374	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN	12	9.896.000
375	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN PERLINTASAN	9	5.079.200
376	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN IZIN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
377	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PELAPORAN DOKUMEN PERJALANAN		
378	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
379	DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN	17	33.240.000
380	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	15	19.280.000
381	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
382	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
383	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
384	KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
385	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
386	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
387	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	5.079.200
388	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
389	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
390	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
391	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200
392	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
393	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
394	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
395	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
396	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
397	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DAN PROTOKOL		
398	KEPALA SUBBAGIAN ANALISIS DAN STRATEGI KOMUNIKASI	9	5.079.200
399	KEPALA SUBBAGIAN PUBLIKASI	9	5.079.200
400	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
401	DIREKTUR KEAMANAN DAN KETERTIBAN	15	19.280.000
402	KEPALA SUBDIREKTORAT INTELJEN	12	9.896.000
403	KEPALA SEKSI INTELJEN WILAYAH I	9	5.079.200
404	KEPALA SEKSI INTELJEN WILAYAH II	9	5.079.200
405	KEPALA SEKSI INTELJEN WILAYAH III	9	5.079.200
406	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PEMELIHARAAN KEAMANAN	12	9.896.000
407	KEPALA SEKSI STRATEGI PENCEGAHAN	9	5.079.200
408	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN KEAMANAN	9	5.079.200
409	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENANGGULANGAN	12	9.896.000
410	KEPALA SEKSI PENINDAKAN	9	5.079.200
411	KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN	9	5.079.200
412	KEPALA SUBDIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN EVALUASI	12	9.896.000
413	KEPALA SEKSI KEPATUHAN INTERNAL DAN KODE ETIK	9	5.079.200
414	KEPALA SEKSI LAYANAN PENGADUAN	9	5.079.200
415	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
416	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
417	DIREKTUR PERAWATAN KESEHATAN DAN REHABILITASI	15	19.280.000
418	KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN DASAR, PENYULUHAN DAN EVALUASI	12	9.896.000
419	KEPALA SEKSI PERAWATAN DASAR DAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KELOMPOK RENTAN		
420	KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN PENCEGAHAN	9	5.079.200
421	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
422	KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN LANJUTAN	12	9.896.000
423	KEPALA SEKSI PERAWATAN RUJUKAN	9	5.079.200
424	KEPALA SEKSI PERAWATAN MENTAL DAN PALIATIF	9	5.079.200
425	KEPALA SUBDIREKTORAT PERAWATAN KESEHATAN KHUSUS DAN REHABILITASI	12	9.896.000
426	KEPALA SEKSI PERAWATAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR	9	5.079.200
427	KEPALA SEKSI PERAWATAN HIV/AIDS	9	5.079.200
428	KEPALA SEKSI REHABILITASI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF	9	5.079.200
429	KEPALA SUBDIREKTORAT KEBUTUHAN DASAR DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	12	9.896.000
430	KEPALA SEKSI KEBUTUHAN DASAR	9	5.079.200
431	KEPALA SEKSI GIZI DAN MAKANAN	9	5.079.200
432	KEPALA SEKSI SANITASI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	9	5.079.200
433	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
434	DIREKTUR PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	15	19.280.000
435	KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PELAYANAN TAHANAN DAN EVALUASI	12	9.896.000
436	KEPALA SEKSI REGISTRASI TAHANAN	9	5.079.200
437	KEPALA SEKSI ASSESMENT DAN KLASIFIKASI TAHANAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
438	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
439	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN TAHANAN	12	9.896.000
440	KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM	9	5.079.200
441	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KETERAMPILAN DAN KEPRIBADIAN	9	5.079.200
442	KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	12	9.896.000
443	KEPALA SEKSI REGISTRASI BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	5.079.200
444	KEPALA SEKSI PENILAIAN DAN KLASIFIKASI BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	5.079.200
445	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	12	9.896.000
446	KEPALA SEKSI KLARIFIKASI DAN MUTASI BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	5.079.200
447	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	5.079.200
448	KEPALA SEKSI PENGAMANAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA	9	5.079.200
449	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
450	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KERJA SAMA	15	19.280.000
451	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	12	9.896.000
452	KEPALA SEKSI PERANCANGAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
453	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	INFORMASI		
454	KEPALA SUBDIREKTORAT DATA DAN INFORMASI	12	9.896.000
455	KEPALA SEKSI ANALISIS DATA DAN INFORMASI	9	5.079.200
456	KEPALA SEKSI PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI	9	5.079.200
457	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DAN EVALUASI	12	9.896.000
458	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DALAM NEGERI	9	5.079.200
459	KEPALA SEKSI KERJA SAMA LUAR NEGERI	9	5.079.200
460	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
461	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	12	9.896.000
462	KEPALA SEKSI PENGAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
463	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
464	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
465	DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGENTASAN ANAK	15	19.280.000
466	KEPALA SUBDIREKTORAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN PENDAMPINGAN	12	9.896.000
467	KEPALA SEKSI PENELITIAN KEMASYARAKATAN	9	5.079.200
468	KEPALA SEKSI ASSESMENT DAN KLASIFIKASI	9	5.079.200
469	KEPALA SEKSI PENDAMPINGAN DAN DIVERSI	9	5.079.200
470	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBIMBINGAN DAN PENGAWASAN	12	9.896.000
471	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEPERIBADIAN	9	5.079.200
472	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMANDIRIAN	9	5.079.200
473	KEPALA SEKSI BIMBINGAN LANJUTAN	9	5.079.200
474	KEPALA SEKSI PENGAWASAN KLIEN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
475	KEPALA SUBDIREKTORAT REGISTRASI DAN EVALUASI	12	9.896.000
476	KEPALA SEKSI REGISTRASI ANAK	9	5.079.200
477	KEPALA SEKSI REGISTRASI KLIEN	9	5.079.200
478	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
479	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PENGENTASAN ANAK	12	9.896.000
480	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN	9	5.079.200
481	KEPALA SEKSI PELAYANAN ANAK	9	5.079.200
482	KEPALA SEKSI PEMBINAAN ANAK	9	5.079.200
483	KEPALA SEKSI INTEGRASI ANAK	9	5.079.200
484	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
485	DIREKTUR PEMBINAAN NARAPIDANA DAN LATIHAN KERJA PRODUKSI	15	19.280.000
486	KEPALA SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PEMBINAAN DAN EVALUASI	12	9.896.000
487	KEPALA SEKSI REGISTRASI NARAPIDANA	9	5.079.200
488	KEPALA SEKSI ASSESMENT DAN KLASIFIKASI NARAPIDANA	9	5.079.200
489	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
490	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBINAAN KEPRIBADIAN	12	9.896.000
491	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN KESADARAN BERNEGARA	9	5.079.200
492	KEPALA SEKSI PEMBINAAN MENTAL DAN DISIPLIN	9	5.079.200
493	KEPALA SEKSI PEMBINAAN JASMANI DAN KESENIAN	9	5.079.200
494	KEPALA SUBDIREKTORAT INTEGRASI NARAPIDANA DAN PENDAYAGUNAAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN	12	9.896.000
495	KEPALA SEKSI ASIMILASI NARAPIDANA	9	5.079.200
496	KEPALA SEKSI INTEGRASI PIDANA UMUM	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
497	KEPALA SEKSI INTEGRASI PIDANA KHUSUS	9	5.079.200
498	KEPALA SEKSI PENDAYAGUNAAN TIM PENGAMAT PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
499	KEPALA SUBDIREKTORAT LATIHAN KETERAMPILAN	12	9.896.000
500	KEPALA SEKSI STANDARDISASI PELATIHAN KETERAMPILAN	9	5.079.200
501	KEPALA SEKSI LATIHAN KERJA	9	5.079.200
502	KEPALA SEKSI KEMITRAAN	9	5.079.200
503	KEPALA SUBDIREKTORAT KEGIATAN KERJA PRODUKSI	12	9.896.000
504	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA INDUSTRI MANUFAKTUR DAN JASA	9	5.079.200
505	KEPALA SEKSI KEGIATAN AGRIBISNIS	9	5.079.200
506	KEPALA SEKSI PEMASARAN	9	5.079.200
507	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SARANA DAN HASIL KERJA	9	5.079.200
508	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
509	DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	17	33.240.000
510	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	15	19.280.000
511	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
512	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
513	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
514	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
515	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
516	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
517	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
518	KEPALA SUBBAGIAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
519	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
520	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
521	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200
522	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	9	5.079.200
523	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI PELAPORAN	9	5.079.200
524	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
525	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
526	KEPALA SUBBAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
527	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
528	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA	12	9.896.000
529	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
530	KEPALA SUBBAGIAN PERJALANAN DINAS DAN PERSURATAN	9	5.079.200
531	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
532	DIREKTUR PERDATA	15	19.280.000
533	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM PERDATA UMUM	12	9.896.000
534	KEPALA SEKSI PENDAPAT HUKUM	9	5.079.200
535	KEPALA SEKSI LEGALISASI	9	5.079.200
536	KEPALA SEKSI ADVOKASI KEPERDATAAN	9	5.079.200
537	KEPALA SEKSI ADVOKAT ASING DAN PENTERJEMAH TERSUMPAH	9	5.079.200
538	KEPALA SUBDIREKTORAT BADAN HUKUM	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
539	KEPALA SEKSI PERSEROAN TERTUTUP	9	5.079.200
540	KEPALA SEKSI PERSEROAN TERBUKA, LEMBAGA KEUANGAN DAN PENANAMAN MODAL	9	5.079.200
541	KEPALA SEKSI BADAN HUKUM SOSIAL	9	5.079.200
542	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN PENGUMUMAN BADAN HUKUM	9	5.079.200
543	KEPALA SUBDIREKTORAT JAMINAN FIDUSIA	12	9.896.000
544	KEPALA SEKSI PELAYANAN FIDUSIA	9	5.079.200
545	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN FIDUSIA	9	5.079.200
546	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI FIDUSIA	9	5.079.200
547	KEPALA SUBDIREKTORAT HARTA PENINGGALAN DAN KURATOR NEGARA	12	9.896.000
548	KEPALA SEKSI BALAI HARTA PENINGGALAN DAN PENDAFTARAN KURATOR	9	5.079.200
549	KEPALA SEKSI DAFTAR PUSAT WASIAT	9	5.079.200
550	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI HARTA PENINGGALAN, KURATOR DAN WASIAT	9	5.079.200
551	KEPALA SUBDIREKTORAT NOTARIAT	12	9.896.000
552	KEPALA SEKSI PENGANGKATAN DAN PERPINDAHAN NOTARIS	9	5.079.200
553	KEPALA SEKSI PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS	9	5.079.200
554	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI NOTARIAT DAN SEKRETARIAT MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS	9	5.079.200
555	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
556	DIREKTUR PIDANA	15	19.280.000
557	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM PIDANA DAN GRASI	12	9.896.000
558	KEPALA SEKSI PELAYANAN HUKUM PIDANA	9	5.079.200
559	KEPALA SEKSI PELAYANAN GRASI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
560	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	9	5.079.200
561	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	12	9.896.000
562	KEPALA SEKSI PENGANGKATAN, PEMUTASIAN, DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	5.079.200
563	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN EVALUASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	9	5.079.200
564	KEPALA SUBDIREKTORAT DAKTILOSKOPI	12	9.896.000
565	KEPALA SEKSI PERUMUSAN	9	5.079.200
566	KEPALA SEKSI DATA DAN IDENTIFIKASI	9	5.079.200
567	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI DAN ARSIP TERAAN	9	5.079.200
568	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
569	DIREKTUR TATA NEGARA	15	19.280.000
570	KEPALA SUBDIREKTORAT STATUS KEWARGANEGARAAN	12	9.896.000
571	KEPALA SEKSI PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
572	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA KEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
573	KEPALA SEKSI KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
574	KEPALA SUBDIREKTORAT PEWARGANEGARAAN	12	9.896.000
575	KEPALA SEKSI ANALISIS DAN PERTIMBANGAN PEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
576	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	9	5.079.200
577	KEPALA SUBDIREKTORAT PARTAI POLITIK	12	9.896.000
578	KEPALA SEKSI PENDAFTARAN BADAN HUKUM PARTAI POLITIK	9	5.079.200
579	KEPALA SEKSI ANALISIS, PERTIMBANGAN,	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DAN ADVOKASI PARTAI POLITIK		
580	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI PARTAI POLITIK	9	5.079.200
581	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
582	DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL	15	19.280.000
583	KEPALA SUBDIREKTORAT BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	12	9.896.000
584	KEPALA SEKSI PENANGANAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	9	5.079.200
585	KEPALA SEKSI PERJANJIAN BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA	9	5.079.200
586	KEPALA SUBDIREKTORAT EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA	12	9.896.000
587	KEPALA SEKSI PENANGANAN EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA	9	5.079.200
588	KEPALA SEKSI PERJANJIAN EKSTRADISI DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA	9	5.079.200
589	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL	12	9.896.000
590	KEPALA SEKSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	9	5.079.200
591	KEPALA SEKSI HUKUM EKONOMI DAN LEMBAGA INTERNASIONAL	9	5.079.200
592	KEPALA SEKSI HUKUM HUMANITER	9	5.079.200
593	KEPALA SEKSI HUKUM LAUT, UDARA, ANGKASA DAN LINGKUNGAN	9	5.079.200
594	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
595	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	15	19.280.000
596	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN DUKUNGAN TEKNIS	12	9.896.000
597	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
598	KEPALA SEKSI DUKUNGAN TEKNIS	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
599	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN JARINGAN DAN PERANGKAT KERAS	12	9.896.000
600	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN KOMUNIKASI DATA	9	5.079.200
601	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PERANGKAT KERAS	9	5.079.200
602	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK	12	9.896.000
603	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN BASIS DATA	9	5.079.200
604	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI	9	5.079.200
605	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
606	DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	17	33.240.000
607	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	15	19.280.000
608	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
609	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
610	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
611	KEPALA SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
612	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
613	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
614	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	9	5.079.200
615	KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN PEGAWAI	9	5.079.200
616	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
617	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	ANGGARAN		
618	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200
619	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	9	5.079.200
620	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
621	KEPALA BAGIAN UMUM, PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN LAYANAN PENGADAAN	12	9.896.000
622	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
623	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
624	KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN	9	5.079.200
625	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	12	9.896.000
626	KEPALA SUBBAGIAN PERSURATAN DAN PERJALANAN DINAS	9	5.079.200
627	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
628	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	9	5.079.200
629	DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	15	19.280.000
630	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12	9.896.000
631	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN	9	5.079.200
632	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI DAN PUBLIKASI	9	5.079.200
633	KEPALA SEKSI VERIFIKASI CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT	9	5.079.200
634	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN DESAIN INDUSTRI	12	9.896.000
635	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
636	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI DAN DOKUMENTASI	12	9.896.000
637	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI, MUTASI DAN LISENSI	9	5.079.200
638	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	9	5.079.200
639	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	12	9.896.000
640	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9	5.079.200
641	KEPALA SEKSI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	9	5.079.200
642	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
643	DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	15	19.280.000
644	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12	9.896.000
645	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN	9	5.079.200
646	KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	9	5.079.200
647	KEPALA SUBDIREKTORAT KLASIFIKASI DAN PENELUSURAN PATEN	12	9.896.000
648	KEPALA SEKSI KLASIFIKASI PATEN	9	5.079.200
649	KEPALA SEKSI PENELUSURAN PATEN	9	5.079.200
650	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN PATEN	12	9.896.000
651	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9	5.079.200
652	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI, PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI	12	9.896.000
653	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI	9	5.079.200
654	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN, MUTASI DAN LISENSI	9	5.079.200
655	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DAN FASILITASI KOMISI BANDING	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PATEN		
656	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9	5.079.200
657	KEPALA SEKSI FASILITASI KOMISI BANDING PATEN	9	5.079.200
658	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
659	DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	15	19.280.000
660	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PUBLIKASI	12	9.896.000
661	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PERMOHONAN DAN KLASIFIKASI	9	5.079.200
662	KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	9	5.079.200
663	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMERIKSAAN MEREK	12	9.896.000
664	KEPALA SEKSI PELAYANAN TEKNIS	9	5.079.200
665	KEPALA SUBDIREKTORAT INDIKASI GEOGRAFIS	12	9.896.000
666	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN INDIKASI GEOGRAFIS	9	5.079.200
667	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN INDIKASI GEOGRAFIS	9	5.079.200
668	KEPALA SUBDIREKTORAT SERTIFIKASI DAN MONITORING MEREK TERDAFTAR	12	9.896.000
669	KEPALA SEKSI SERTIFIKASI	9	5.079.200
670	KEPALA SEKSI MUTASI DAN LISENSI	9	5.079.200
671	KEPALA SEKSI PERPANJANGAN DAN MONITORING	9	5.079.200
672	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN HUKUM DAN FASILITASI KOMISI BANDING MEREK	12	9.896.000
673	KEPALA SEKSI PERTIMBANGAN HUKUM DAN LITIGASI	9	5.079.200
674	KEPALA SEKSI FASILITASI KOMISI BANDING	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	MEREK		
675	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
676	DIREKTUR KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	15	19.280.000
677	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	12	9.896.000
678	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	5.079.200
679	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PROMOSI	9	5.079.200
680	KEPALA SEKSI INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN PERPUSTAKAAN	9	5.079.200
681	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI	12	9.896.000
682	KEPALA SEKSI KERJA SAMA REGIONAL	9	5.079.200
683	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BILATERAL	9	5.079.200
684	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ORGANISASI INTERNASIONAL	9	5.079.200
685	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI	12	9.896.000
686	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTARLEMBAGA PEMERINTAH	9	5.079.200
687	KEPALA SEKSI KERJA SAMA ANTARLEMBAGA NONPEMERINTAH DAN MONITORING KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	5.079.200
688	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
689	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	15	19.280.000
690	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN	12	9.896.000
691	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN STANDARDISASI TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
692	KEPALA SEKSI PORTAL WEB	9	5.079.200
693	KEPALA SUBDIREKTORAT PENDUKUNG	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	INFRASTRUKTUR		
694	KEPALA SEKSI LAYANAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR	9	5.079.200
695	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN JARINGAN	9	5.079.200
696	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	12	9.896.000
697	KEPALA SEKSI APLIKASI	9	5.079.200
698	KEPALA SEKSI DATABASE DAN KEAMANAN DATA	9	5.079.200
699	KEPALA SEKSI PELAYANAN DATA DAN INFOMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	5.079.200
700	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
701	DIREKTUR PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	15	19.280.000
702	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGADUAN DAN ADMINISTRASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	12	9.896.000
703	KEPALA SEKSI PENERIMAAN PENGADUAN	9	5.079.200
704	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN DOKUMENTASI	9	5.079.200
705	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PEMANTAUAN	12	9.896.000
706	KEPALA SEKSI PENINDAKAN	9	5.079.200
707	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN BARANG BUKTI	9	5.079.200
708	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	12	9.896.000
709	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN	9	5.079.200
710	KEPALA SEKSI PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
711	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
712	DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	17	33.240.000
713	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
714	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
715	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200
716	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
717	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
718	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
719	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
720	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	5.079.200
721	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
722	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
723	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	9.896.000
724	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
725	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
726	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
727	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
728	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA	12	9.896.000
729	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	5.079.200
730	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERSURATAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
731	DIREKTUR PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	15	19.280.000
732	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH I	12	9.896.000
733	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH I	9	5.079.200
734	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH I	9	5.079.200
735	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH II	12	9.896.000
736	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH II	9	5.079.200
737	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH II	9	5.079.200
738	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH III	12	9.896.000
739	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH III	9	5.079.200
740	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH III	9	5.079.200
741	KEPALA SUBDIREKTORAT PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT WILAYAH IV	12	9.896.000
742	KEPALA SEKSI HAK SIPIL DAN POLITIK WILAYAH IV	9	5.079.200
743	KEPALA SEKSI HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA WILAYAH IV	9	5.079.200
744	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
745	DIREKTUR KERJA SAMA HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
746	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I	12	9.896.000
747	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I.A		
748	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I.B	9	5.079.200
749	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I.C	9	5.079.200
750	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA LUAR NEGERI	12	9.896.000
751	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BILATERAL	9	5.079.200
752	KEPALA SEKSI KERJA SAMA REGIONAL	9	5.079.200
753	KEPALA SEKSI KERJA SAMA BADAN-BADAN KHUSUS PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, DAN ORGANISASI INTERNASIONAL NON PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA	9	5.079.200
754	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA DALAM NEGERI DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II	12	9.896.000
755	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II.A	9	5.079.200
756	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II.B	9	5.079.200
757	KEPALA SEKSI KERJA SAMA DAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II.C	9	5.079.200
758	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
759	DIREKTUR DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
760	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN TEKNIS DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	ASASI MANUSIA		
761	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
762	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
763	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	9	5.079.200
764	KEPALA SUBDIREKTORAT DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH I	12	9.896.000
765	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IA	9	5.079.200
766	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IB	9	5.079.200
767	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IC	9	5.079.200
768	KEPALA SUBDIREKTORAT DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH II	12	9.896.000
769	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIA	9	5.079.200
770	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIB	9	5.079.200
771	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIC	9	5.079.200
772	KEPALA SUBDIREKTORAT DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH III	12	9.896.000
773	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIIA	9	5.079.200
774	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIIB	9	5.079.200
775	KEPALA SEKSI DISEMINASI DAN PENGUATAN HAK ASASI MANUSIA WILAYAH IIIC	9	5.079.200
776	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
777	DIREKTUR INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
778	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK	12	9.896.000
779	KEPALA SEKSI ANALISIS INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK	9	5.079.200
780	KEPALA SEKSI PENYIAPAN INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK	9	5.079.200
781	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK SIPIL DAN POLITIK	9	5.079.200
782	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	12	9.896.000
783	KEPALA SEKSI ANALISIS INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	5.079.200
784	KEPALA SEKSI PENYIAPAN INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	5.079.200
785	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	5.079.200
786	KEPALA SUBDIREKTORAT INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN	12	9.896.000
787	KEPALA SEKSI ANALISIS INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN	9	5.079.200
788	KEPALA SEKSI PENYIAPAN INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN	9	5.079.200
789	KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN HAK KELOMPOK RENTAN	9	5.079.200
790	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
791	DIREKTUR INFORMASI HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
792	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	12	9.896.000
793	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	INFORMASI DAN KOMUNIKASI		
794	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9	5.079.200
795	KEPALA SUBDIREKTORAT PUBLIKASI MEDIA	12	9.896.000
796	KEPALA SEKSI PUBLIKASI MEDIA CETAK	9	5.079.200
797	KEPALA SEKSI PUBLIKASI MEDIA ELEKTRONIK	9	5.079.200
798	KEPALA SEKSI PUBLIKASI MEDIA ONLINE	9	5.079.200
799	KEPALA SUBDIREKTORAT PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI	12	9.896.000
800	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN	9	5.079.200
801	KEPALA SEKSI DOKUMENTASI	9	5.079.200
802	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
803	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17	33.240.000
804	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
805	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
806	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
807	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN, REFORMASI BIROKRASI, DAN PELAPORAN	9	5.079.200
808	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
809	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ADMINISTRASI JABATAN	9	5.079.200
810	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
811	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
812	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
813	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	9	5.079.200
814	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
815	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
816	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PERSURATAN	9	5.079.200
817	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
818	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA	12	9.896.000
819	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
820	KEPALA SUBBAGIAN KERJA SAMA	9	5.079.200
821	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
822	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENYIAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	9.896.000
823	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN	9	5.079.200
824	KEPALA SEKSI PENYIAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	5.079.200
825	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG, DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH	12	9.896.000
826	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	UNDANG-UNDANG		
827	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH	9	5.079.200
828	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	12	9.896.000
829	KEPALA SEKSI PEMBAHASAN I	9	5.079.200
830	KEPALA SEKSI PEMBAHASAN II	9	5.079.200
831	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN DAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
832	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN	9	5.079.200
833	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
834	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
835	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I	15	19.280.000
836	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN	12	9.896.000
837	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG POLITIK	9	5.079.200
838	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PEMERINTAHAN	9	5.079.200
839	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN	12	9.896.000
840	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PERTAHANAN	9	5.079.200
841	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG KEAMANAN	9	5.079.200
842	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA		
843	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA I	9	5.079.200
844	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA II	9	5.079.200
845	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, KELEMBAGAAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	9.896.000
846	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN	9	5.079.200
847	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	5.079.200
848	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
849	DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
850	KEPALA SUBDIREKTORAT PUBLIKASI, DOKUMENTASI, DAN PERPUSTAKAAN	12	9.896.000
851	KEPALA SEKSI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI	9	5.079.200
852	KEPALA SEKSI PERPUSTAKAAN	9	5.079.200
853	KEPALA SUBDIREKTORAT PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	9.896.000
854	KEPALA SEKSI PENERJEMAHAN BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, KEAMANAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9	5.079.200
855	KEPALA SEKSI PENERJEMAHAN BIDANG PEREKONOMIAN	9	5.079.200
856	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	9.896.000
857	KEPALA SEKSI PENGUNDANGAN DALAM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		
858	KEPALA SEKSI PENGUNDANGAN DALAM BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9	5.079.200
859	KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	9.896.000
860	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI	9	5.079.200
861	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	9	5.079.200
862	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
863	DIREKTUR LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
864	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA DAN KEAMANAN	12	9.896.000
865	KEPALA SEKSI BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN KEAMANAN I	9	5.079.200
866	KEPALA SEKSI BIDANG POLITIK, HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN KEAMANAN II	9	5.079.200
867	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN BIDANG PEREKONOMIAN	12	9.896.000
868	KEPALA SEKSI BIDANG PEREKONOMIAN I	9	5.079.200
869	KEPALA SEKSI BIDANG PEREKONOMIAN II	9	5.079.200
870	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN DAN PENDAMPINGAN PERSIDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	12	9.896.000
871	KEPALA SEKSI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT I	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
872	KEPALA SEKSI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT II	9	5.079.200
873	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
874	DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	15	19.280.000
875	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN, PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN AKREDITASI	12	9.896.000
876	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIS FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	9	5.079.200
877	KEPALA SEKSI PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN AKREDITASI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	5.079.200
878	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	12	9.896.000
879	KEPALA SEKSI FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH I	9	5.079.200
880	KEPALA SEKSI FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH II	9	5.079.200
881	KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN BIMBINGAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12	9.896.000
882	KEPALA SEKSI STANDARDISASI, PEDOMAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	5.079.200
883	KEPALA SEKSI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	9	5.079.200
884	KEPALA SUBDIREKTORAT SISTEM INFORMASI, MANAJEMEN DAN PENILAIAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
885	KEPALA SEKSI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9	5.079.200
886	KEPALA SEKSI PENILAIAN ANGKA KREDIT PERANCANG PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	9	5.079.200
887	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
888	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II	15	19.280.000
889	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG MONETER, JASA KEUANGAN, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN PENANAMAN MODAL	12	9.896.000
890	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG MONETER DAN JASA KEUANGAN	9	5.079.200
891	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG BADAN USAHA MILIK NEGARA, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL	9	5.079.200
892	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN FISKAL	12	9.896.000
893	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, PENGANGGARAN, DAN PERBENDAHARAAN NEGARA	9	5.079.200
894	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PENERIMAAN NEGARA, CUKAI, DAN KEPABEANAN	9	5.079.200
895	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, PRASARANA, AGRARIA,	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DAN TATA RUANG		
896	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN KEHUTANAN	9	5.079.200
897	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PRASARANA, AGRARIA, DAN TATA RUANG	9	5.079.200
898	KEPALA SUBDIREKTORAT HARMONISASI BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	12	9.896.000
899	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9	5.079.200
900	KEPALA SEKSI HARMONISASI BIDANG RISET DAN TEKNOLOGI	9	5.079.200
901	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
902	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17	33.240.000
903	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
904	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN KERJA SAMA	12	9.896.000
905	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
906	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA	9	5.079.200
907	KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
908	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
909	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN MUTASI KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
910	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
911	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
912	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
913	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
914	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200
915	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
916	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM	12	9.896.000
917	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERPUSTAKAAN	9	5.079.200
918	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	9	5.079.200
919	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	5.079.200
920	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN	15	19.280.000
921	KEPALA BIDANG PROGRAM	12	9.896.000
922	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	9	5.079.200
923	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA	9	5.079.200
924	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12	9.896.000
925	KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN	9	5.079.200
926	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	5.079.200
927	KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	12	9.896.000
928	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	9	5.079.200
929	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	9	5.079.200
930	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
931	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	15	19.280.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DAN PELATIHAN FUNGSIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA		
932	KEPALA BIDANG PROGRAM	12	9.896.000
933	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN	9	5.079.200
934	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI DAN METODA	9	5.079.200
935	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12	9.896.000
936	KEPALA SUBBIDANG PENGAJARAN	9	5.079.200
937	KEPALA SUBBIDANG ADMINISTRASI PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	5.079.200
938	KEPALA BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	12	9.896.000
939	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI	9	5.079.200
940	KEPALA SUBBIDANG PELAPORAN	9	5.079.200
941	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
942	KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	15	19.280.000
943	KEPALA BIDANG PROGRAM	12	9.896.000
944	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM	9	5.079.200
945	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
946	KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN	12	9.896.000
947	KEPALA SUBBIDANG STANDARDISASI KOMPETENSI	9	5.079.200
948	KEPALA SUBBIDANG PENILAIAN KOMPETENSI	9	5.079.200
949	KEPALA BIDANG SISTEM INFORMASI	12	9.896.000
950	KEPALA SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI	9	5.079.200
951	KEPALA SUBBIDANG SISTEM DAN JARINGAN	9	5.079.200
952	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
953	DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PEMERINTAHAN	15	19.280.000
954	WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK, KETARUNAAN DAN ALUMNI	14	17.064.000
955	WAKIL DIREKTUR BIDANG ADMNISTRASI UMUM	14	17.064.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
956	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN	12	9.896.000
957	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM	12	9.896.000
958	KEPALA SUBBAGIAN AKADEMIK	9	5.079.200
959	KEPALA SUBBAGIAN KETARUNAAN	9	5.079.200
960	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	9	5.079.200
961	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
962	DIREKTUR POLITEKNIK IMIGRASI	15	19.280.000
963	WAKIL DIREKTUR BIDANG ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PESERTA DIDIK	14	17.064.000
964	WAKIL DIREKTUR BIDANG ADMNISTRASI UMUM	14	17.064.000
965	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN PESERTA DIDIK	12	9.896.000
966	KEPALA BAGIAN ADMINISTASI UMUM	12	9.896.000
967	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK	9	5.079.200
968	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI PESERTA DIDIK	9	5.079.200
969	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	9	5.079.200
970	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
971	KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	17	33.240.000
972	SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
973	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
974	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
975	KEPALA SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
976	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN, REFORMASI BIROKRASI, EVALUASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
977	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
978	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
979	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9	5.079.200
980	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
981	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
982	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
983	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN	9	5.079.200
984	KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
985	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, KERJASAMA DAN TATA USAHA	12	9.896.000
986	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEARSIPAN	9	5.079.200
987	KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI KERJA SAMA	9	5.079.200
988	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	5.079.200
989	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
990	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
991	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
992	KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
993	KEPALA BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAHAN	12	9.896.000
994	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAHAN I	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
995	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN DAN PEMERINTAHAN II	9	5.079.200
996	KEPALA BIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR	12	9.896.000
997	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR I	9	5.079.200
998	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN INFRASTRUKTUR II	9	5.079.200
999	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	12	9.896.000
1000	KEPALA SUBBIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP I	9	5.079.200
1001	KEPALA SUBBIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP II	9	5.079.200
1002	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA	12	9.896.000
1003	KEPALA SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA I	9	5.079.200
1004	KEPALA SUBBIDANG SOSIAL BUDAYA II	9	5.079.200
1005	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1006	KEPALA PUSAT PERENCANAAN HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
1007	KEPALA BIDANG PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK	12	9.896.000
1008	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM LINGKUNGAN HIDUP	9	5.079.200
1009	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN SOSIAL BUDAYA	9	5.079.200
1010	KEPALA BIDANG PERENCANAAN LEGISLASI	12	9.896.000
1011	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PROGRAM	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	LEGISLASI NASIONAL		
1012	KEPALA SUBBIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN DAN FASILITASI PROGRAM LEGISLASI DAERAH	9	5.079.200
1013	KEPALA BIDANG PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK	12	9.896.000
1014	KEPALA SUBBIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM LINGKUNGAN HIDUP	9	5.079.200
1015	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI, KEUANGAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN SOSIAL BUDAYA	9	5.079.200
1016	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1017	KEPALA PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN INFORMASI HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
1018	KEPALA BIDANG OTOMASI DOKUMENTASI HUKUM	12	9.896.000
1019	KEPALA SUBBIDANG PENGOLAHAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM	9	5.079.200
1020	KEPALA SUBBIDANG DIGITALISASI DOKUMEN HUKUM	9	5.079.200
1021	KEPALA BIDANG PELAYANAN INFORMASI HUKUM	12	9.896.000
1022	KEPALA SUBBIDANG PENGUMPULAN DAN PEMELIHARAAN KOLEKSI	9	5.079.200
1023	KEPALA SUBBIDANG SIRKULASI DAN REFERENSI	9	5.079.200
1024	KEPALA BIDANG JARINGAN INFORMASI HUKUM	12	9.896.000
1025	KEPALA SUBBIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN JARINGAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1026	KEPALA SUBBIDANG PENERBITAN DAN PUBLIKASI HUKUM	9	5.079.200
1027	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1028	KEPALA PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM	15	19.280.000
1029	KEPALA BIDANG PENYULUHAN HUKUM	12	9.896.000
1030	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN PENYULUHAN HUKUM	9	5.079.200
1031	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PENYULUH HUKUM	9	5.079.200
1032	KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN HUKUM	12	9.896.000
1033	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	9	5.079.200
1034	KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN DESA SADAR HUKUM	9	5.079.200
1035	KEPALA BIDANG BANTUAN HUKUM	12	9.896.000
1036	KEPALA SUBBIDANG PROGRAM BANTUAN HUKUM	9	5.079.200
1037	KEPALA SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN HUKUM	9	5.079.200
1038	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1039	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	17	33.240.000
1040	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
1041	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	12	9.896.000
1042	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN RENCANA DAN ANGGARAN	9	5.079.200
1043	KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN,	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	REFORMASI BIROKRASI, EVALUASI DAN PELAPORAN		
1044	KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN	12	9.896.000
1045	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
1046	KEPALA SUBBAGIAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN	9	5.079.200
1047	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL	9	5.079.200
1048	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	12	9.896.000
1049	KEPALA SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	9	5.079.200
1050	KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
1051	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN UMUM	12	9.896.000
1052	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
1053	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
1054	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TATA USAHA	12	9.896.000
1055	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	9	5.079.200
1056	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN PERSURATAN	9	5.079.200
1057	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM	15	19.280.000
1058	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBTANSI HUKUM	12	9.896.000
1059	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN FORMULASI HUKUM	9	5.079.200
1060	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI HUKUM	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1061	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN STRUKTUR HUKUM	12	9.896.000
1062	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM	9	5.079.200
1063	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENEGAKAN HUKUM	9	5.079.200
1064	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN BUDAYA HUKUM	12	9.896.000
1065	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT HUKUM	9	5.079.200
1066	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA HUKUM	9	5.079.200
1067	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1068	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
1069	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK SIPIL DAN POLITIK	12	9.896.000
1070	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK SIPIL	9	5.079.200
1071	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK POLITIK	9	5.079.200
1072	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	12	9.896.000
1073	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK EKONOMI	9	5.079.200
1074	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAK SOSIAL DAN BUDAYA	9	5.079.200
1075	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK	12	9.896.000
1076	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK SIPIL	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DAN POLITIK		
1077	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	9	5.079.200
1078	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1079	KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	15	19.280.000
1080	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	12	9.896.000
1081	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN	9	5.079.200
1082	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KETATALAKSANAAN	9	5.079.200
1083	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA MANUSIA	12	9.896.000
1084	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	9	5.079.200
1085	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9	5.079.200
1086	KEPALA BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI	12	9.896.000
1087	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1088	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI	9	5.079.200
1089	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1090	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15	19.280.000
1091	KEPALA BIDANG META ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
1092	KEPALA SUBBIDANG META ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM	9	5.079.200
1093	KEPALA SUBBIDANG META ANALISIS DATA PENELITIAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
1094	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
1095	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
1096	KEPALA SUBBIDANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
1097	KEPALA BIDANG FASILITASI PUBLIKASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
1098	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI PENELITIAN HUKUM	9	5.079.200
1099	KEPALA SUBBIDANG PUBLIKASI PENELITIAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
1100	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1101	KEPALA KANTOR WILAYAH	15	19.280.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1102	KEPALA DIVISI ADMINISTRASI	14	17.064.000
1103	KEPALA BAGIAN UMUM	12	9.896.000
1104	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, TATA USAHA, DAN RUMAH TANGGA	9	5.079.200
1105	KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	9	5.079.200
1106	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	12	9.896.000
1107	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	9	5.079.200
1108	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, REFORMASI BIROKRASI, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	9	5.079.200
1109	KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN	14	17.064.000
1110	KEPALA BIDANG PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	12	9.896.000
1111	KEPALA SUBBIDANG BIMBINGAN DAN PENGENTASAN ANAK	9	5.079.200
1112	KEPALA SUBBIDANG PEMBINAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KERJA SAMA	9	5.079.200
1113	KEPALA BIDANG PELAYANAN TAHANAN, KESEHATAN, REHABILITASI, PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, KEAMANAN	12	9.896.000
1114	KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN NEGARA, DAN KEAMANAN	9	5.079.200
1115	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN TAHANAN, PERAWATAN KESEHATAN, DAN REHABILITASI	9	5.079.200
1116	KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN	14	17.064.000
1117	KEPALA BIDANG PERIZINAN DAN INFORMASI KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
1118	KEPALA SUBBIDANG PERIZINAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KEIMIGRASIAN		
1119	KEPALA SUBBIDANG INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1120	KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	12	9.896.000
1121	KEPALA SUBBIDANG INTELIJEN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1122	KEPALA SUBBIDANG PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1123	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	14	17.064.000
1124	KEPALA BIDANG PELAYANAN HUKUM	12	9.896.000
1125	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	9	5.079.200
1126	KEPALA SUBBIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	9	5.079.200
1127	KEPALA BIDANG HUKUM	12	9.896.000
1128	KEPALA SUBBIDANG FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	9	5.079.200
1129	KEPALA SUBBIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM	9	5.079.200
1130	KEPALA BIDANG HAK ASASI MANUSIA	12	9.896.000
1131	KEPALA SUBBIDANG PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
1132	KEPALA SUBBIDANG PENGKAJIAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9	5.079.200
1133	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I	14	17.064.000
1134	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	11	8.757.600
1135	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	8.757.600

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1136	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
1137	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
1138	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
1139	KEPALA BIDANG PEMBINAAN NARAPIDANA	11	8.757.600
1140	KEPALA SEKSI REGISTRASI	9	5.079.200
1141	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1142	KEPALA SEKSI PERAWATAN NARAPIDANA	9	5.079.200
1143	KEPALA BIDANG KEGIATAN KERJA	11	8.757.600
1144	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KERJA	9	5.079.200
1145	KEPALA SEKSI SARANA KERJA	9	5.079.200
1146	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN HASIL KERJA	9	5.079.200
1147	KEPALA BIDANG ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	11	8.757.600
1148	KEPALA SEKSI KEAMANAN	9	5.079.200
1149	KEPALA SEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1150	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA	12	9.896.000
1151	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1152	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1153	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1154	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1155	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	9	5.079.200
1156	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1157	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8	4.595.150
1158	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1159	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	4.595.150
1160	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1161	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1162	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1163	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1164	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA NARKOTIKA	12	9.896.000
1165	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1166	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1167	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1168	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1169	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	9	5.079.200
1170	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1171	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8	4.595.150
1172	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1173	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	4.595.150
1174	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	4.595.150
1175	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1176	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1177	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1178	KEPALA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA KELAS I	12	9.896.000
1179	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
1180	KEPALA SEKSI REGISTRASI, PERAWATAN DAN PELAYANAN	9	5.079.200
1181	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PENEGAKAN DISIPLIN		
1182	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	8	4.595.150
1183	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8	4.595.150
1184	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN	8	4.595.150
1185	KEPALA SUBSEKSI ADMNISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8	4.595.150
1186	KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I	12	9.896.000
1187	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
1188	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	9	5.079.200
1189	KEPALA SEKSI PEMBINAAN	9	5.079.200
1190	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9	5.079.200
1191	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	9	5.079.200
1192	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	8	4.595.150
1193	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8	4.595.150
1194	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1195	KEPALA SUBSEKSI PENILAIAN DAN PENGKLASIFIKASIAN	8	4.595.150
1196	KEPALA SUBSEKSI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KETERAMPILAN	8	4.595.150
1197	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PENGETASAN	8	4.595.150
1198	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN MAKANAN, MINUMAN DAN PERLENGKAPAN NARAPIDANA	8	4.595.150
1199	KEPALA SUBSEBSEKSI PELAYANAN KESEHATAN	8	4.595.150
1200	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8	4.595.150
1201	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PEREMPUAN KELAS IIA		
1202	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1203	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK	9	5.079.200
1204	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1205	KEPALA SEKSI ADMNISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1206	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1207	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1208	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1209	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1210	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN	8	4.595.150
1211	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA	8	4.595.150
1212	KEPALA SUBSEKSI SARANA KERJA	8	4.595.150
1213	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1214	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1215	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B	12	9.896.000
1216	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1217	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1218	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1219	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1220	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1221	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1222	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	BIMBINGAN KEMASYARAKATAN		
1223	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	8	4.595.150
1224	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	4.595.150
1225	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1226	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1227	KEPALA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II	12	9.896.000
1228	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
1229	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	9	5.079.200
1230	KEPALA SEKSI PEMBINAAN	9	5.079.200
1231	KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	9	5.079.200
1232	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN TATA USAHA	8	4.595.150
1233	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8	4.595.150
1234	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1235	KEPALA SUBSEKSI PENILAIAN DAN PENGKLASIFIKASIAN	8	4.595.150
1236	KEPALA SUBSEKSI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
1237	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8	4.595.150
1238	KEPALA SUBSEKSI ADMNISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8	4.595.150
1239	KEPALA LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA KELAS II	10	5.979.200
1240	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1241	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI	8	4.595.150
1242	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN DAN PELAYANAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1243	KEPALA SUBSEKSI ADMNISTRASI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN	8	4.595.150
1244	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB	12	9.896.000
1245	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1246	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1247	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1248	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1249	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1250	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
1251	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK	8	4.595.150
1252	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	4.595.150
1253	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1254	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1255	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1256	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TERBUKA	12	9.896.000
1257	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1258	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1259	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1260	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1261	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA		
1262	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
1263	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA /ANAK DIDIK	8	4.595.150
1264	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	4.595.150
1265	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1266	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1267	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1268	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB	12	9.896.000
1269	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	9	5.079.200
1270	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1271	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	8	4.595.150
1272	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1273	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA /ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA	9	5.079.200
1274	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI DAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
1275	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN NARAPIDANA /ANAK DIDIK	8	4.595.150
1276	KEPALA SUBSEKSI KEGIATAN KERJA	8	4.595.150
1277	KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB	9	5.079.200
1278	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	8	4.595.150
1279	KEPALA SUBSEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB	8	4.595.150
1280	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS III	10	5.979.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1281	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
1282	KEPALA SUBSEKSI ADMISI DAN ORIENTASI	8	4.595.150
1283	KEPALA SUBSEKSI PEMBINAAN	8	4.595.150
1284	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	8	4.595.150
1285	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I	12	9.896.000
1286	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUTAN	9	5.079.200
1287	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
1288	KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN	9	5.079.200
1289	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PERAWATAN	8	4.595.150
1290	KEPALA SUBSEKSI BANTUAN HUKUM DAN PENYULUHAN	8	4.595.150
1291	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	4.595.150
1292	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	9	5.079.200
1293	KEPALA SUBSEKSI KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	8	4.595.150
1294	KEPALA SUBSEKSI UMUM	8	4.595.150
1295	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA	10	5.979.200
1296	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
1297	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	4.595.150
1298	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	4.595.150
1299	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
1300	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA PEREMPUAN KELAS IIA	10	5.979.200
1301	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	4.595.150
1302	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEGIATAN	8	4.595.150
1303	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
1304	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	TAHANAN NEGARA		
1305	KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB	10	5.979.200
1306	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
1307	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN	8	4.595.150
1308	KEPALA SUBSEKSI PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA	8	4.595.150
1309	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I	12	9.896.000
1310	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1311	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
1312	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
1313	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1314	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	9	5.079.200
1315	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1316	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
1317	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8	4.595.150
1318	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	9	5.079.200
1319	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1320	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KEMASYARAKATAN	8	4.595.150
1321	KEPALA SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA	8	4.595.150
1322	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II	10	5.979.200
1323	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
1324	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN DEWASA	8	4.595.150
1325	KEPALA SEKSI BIMBINGAN KLIEN ANAK	8	4.595.150
1326	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS I	10	5.979.200
1327	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PEMELIHARAAN	8	4.595.150
1328	KEPALA SUBSEKSI PENGAMANAN DAN PENGELOLAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1329	KEPALA RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II	10	5.979.200
1330	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA	8	4.595.150
1331	KEPALA CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA	10	5.979.200
1332	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN TAHANAN DAN PENGELOLAAN CABANG RUTAN	8	4.595.150
1333	KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN	12	9.896.000
1334	SEKRETARIS BALAI HARTA PENINGGALAN	10	5.979.200
1335	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I	9	5.079.200
1336	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II	9	5.079.200
1337	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III	9	5.079.200
1338	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1339	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
1340	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
1341	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1342	KEPALA URUSAN HARTA PENINGGALAN DAN KEPAILITAN	8	4.595.150
1343	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI	14	17.064.000
1344	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	8.757.600
1345	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9	5.079.200
1346	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
1347	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
1348	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1349	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KEIMIGRASIAN		
1350	KEPALA BIDANG DOKUMEN PERJALANAN DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
1351	KEPALA SEKSI DOKUMEN PERJALANAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1352	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1353	KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
1354	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1355	KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1356	KEPALA BIDANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI	11	8.757.600
1357	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN I	10	5.979.200
1358	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN II	10	5.979.200
1359	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN III	10	5.979.200
1360	KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN IV	10	5.979.200
1361	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI	14	17.064.000
1362	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	8.757.600
1363	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	9	5.079.200
1364	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
1365	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN	11	8.757.600
1366	KEPALA SEKSI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
1367	KEPALA SEKSI VERIFIKASI DAN ADJUDIKASI DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
1368	KEPALA BIDANG IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
1369	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1370	KEPALA SEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1371	KEPALA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN	11	8.757.600

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN		
1372	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1373	KEPALA SEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1374	KEPALA BIDANG INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	11	8.757.600
1375	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1376	KEPALA SEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1377	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI	12	9.896.000
1378	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1379	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1380	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1381	KEPALA SEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1382	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	8	4.595.150
1383	KEPALA SUBSEKSI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1384	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1385	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1386	KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1387	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1388	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1389	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1390	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1391	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1392	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
1393	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1394	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI	12	9.896.000
1395	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1396	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1397	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1398	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERJALANAN	9	5.079.200
1399	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN DOKUMEN PERJALANAN	8	4.595.150
1400	KEPALA SUBSEKSI VERIFIKASI DAN ADJUDIKASI DOKUMEN PERJALANAN	8	4.595.150
1401	KEPALA SEKSI IZIN TINGGAL DAN STATUS KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1402	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1403	KEPALA SUBSEKSI STATUS KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1404	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1405	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1406	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1407	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1408	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
1409	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
1410	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1411	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI	11	8.757.600
1412	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1413	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
1414	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1415	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1416	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1417	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1418	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1419	KEPALA SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1420	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1421	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1422	KEPALA SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1423	KEPALA SUBSEKSI INTELIJEN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1424	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1425	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI	11	8.757.600
1426	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1427	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
1428	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
1429	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1430	KEPALA SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1431	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1432	KEPALA SUBSEKSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1433	KEPALA SEKSI DOKUMEN DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1434	KEPALA SUBSEKSI DOKUMEN PERJALANAN	8	4.595.150
1435	KEPALA SUBSEKSI IZIN TINGGAL	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KEIMIGRASIAN		
1436	KEPALA SEKSI INTELJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	9	5.079.200
1437	KEPALA SUBSEKSI INTELJEN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1438	KEPALA SUBSEKSI PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1439	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI	10	5.979.200
1440	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
1441	KEPALA SUBSEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1442	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI, INTELJEN, DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1443	KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI	10	5.979.200
1444	KEPALA URUSAN TATA USAHA	8	4.595.150
1445	KEPALA SUBSEKSI PELAYANAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1446	KEPALA SUBSEKSI TEKNOLOGI INFORMASI, INTELJEN, DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN	8	4.595.150
1447	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT	14	17.064.000
1448	KEPALA BAGIAN TATA USAHA	11	8.757.600
1449	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	9	5.079.200
1450	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	9	5.079.200
1451	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	9	5.079.200
1452	KEPALA BIDANG REGISTRASI DAN PERAWATAN	11	8.757.600
1453	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI, DAN PELAPORAN	9	5.079.200
1454	KEPALA SEKSI PERAWATAN	9	5.079.200
1455	KEPALA SEKSI KESEHATAN	9	5.079.200
1456	KEPALA BIDANG PENEMPATAN, KEAMANAN, PEMULANGAN DAN DEPORTASI	11	8.757.600
1457	KEPALA SEKSI KEAMANAN	10	5.979.200
1458	KEPALA SEKSI PENEMPATAN	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1459	KEPALA SEKSI PEMULANGAN DAN DEPORTASI	9	5.079.200
1460	KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI	12	9.896.000
1461	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1462	KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN	8	4.595.150
1463	KEPALA URUSAN KEUANGAN	8	4.595.150
1464	KEPALA URUSAN UMUM	8	4.595.150
1465	KEPALA SEKSI REGISTRASI, ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	9	5.079.200
1466	KEPALA SUBSEKSI REGISTRASI	8	4.595.150
1467	KEPALA SUBSEKSI ADMINISTRASI DAN PELAPORAN	8	4.595.150
1468	KEPALA SEKSI PERAWATAN DAN KESEHATAN	9	5.079.200
1469	KEPALA SUBSEKSI PERAWATAN	8	4.595.150
1470	KEPALA SUBSEKSI KESEHATAN	8	4.595.150
1471	KEPALA SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	10	5.979.200
1472	KEPALA SUBSEKSI KEAMANAN	9	5.079.200
1473	KEPALA SUBSEKSI KETERTIBAN	9	5.079.200
1474	KEPALA RUMAH SAKIT	12	9.896.000
1475	KEPALA SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	9	5.079.200
1476	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	9	5.079.200
1477	KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	13	10.936.000
1478	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	9	5.079.200
1479	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN	9	5.079.200
1480	KEPALA SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI	9	5.079.200

D. DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI		
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTAMA	9	5.079.200
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MUDA	11	8.757.600
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MADYA	13	10.936.000
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UTAMA	15	19.280.000
2	PEMERIKSA PATEN AHLI		
	PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PEMERIKSA PATEN MUDA	9	5.079.200
	PEMERIKSA PATEN MADYA	11	8.757.600
	PEMERIKSA PATEN UTAMA	13	10.936.000
3	PEMERIKSA MEREK AHLI		
	PEMERIKSA MEREK PERTAMA	8	4.595.150
	PEMERIKSA MEREK MUDA	9	5.079.200
	PEMERIKSA MEREK MADYA	11	8.757.600
	PEMERIKSA MEREK UTAMA	13	10.936.000
4	PEMERIKSA MEREK TERAMPIL		
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA	6	3.510.400
	PEMERIKSA MEREK PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PEMERIKSA MEREK PENYELIA	8	4.595.150
5	DOKTER/SPEKIALIS		
	DOKTER PERTAMA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	DOKTER MUDA	9	5.079.200
	DOKTER MADYA	11	8.757.600
	DOKTER UTAMA	13	10.936.000
6	DOKTER GIGI/SPELIALIS		
	DOKTER GIGI PERTAMA	8	4.595.150
	DOKTER GIGI MUDA	9	5.079.200
	DOKTER GIGI MADYA	11	8.757.600
	DOKTER GIGI UTAMA	13	10.936.000
7	PERAWAT GIGI		
	PERAWAT GIGI PEMULA	5	3.134.250
	PERAWAT GIGI PELAKSANA	6	3.510.400
	PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PERAWAT GIGI PENYELIA	8	4.595.150
8	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL		
	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	6	3.510.400
	TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	7	3.915.950
	TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA	8	4.595.150
9	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI		
	TERAPIS GIGI DAN MULUT PERTAMA	8	4.595.150
	TERAPIS GIGI DAN MULUT MUDA	9	5.079.200
	TERAPIS GIGI DAN MULUT MADYA	11	8.757.600
10	PERAWAT AHLI		
	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PERAWAT AHLI MUDA	9	5.079.200
	PERAWAT AHLI MADYA	11	8.757.600
	PERAWAT AHLI UTAMA	13	10.936.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
11	PERAWAT TERAMPIL	6	3.510.400
	PERAWAT MAHIR	7	3.915.950
	PERAWAT PENYELIA	8	4.595.150
12	ARSIPARIS AHLI		
	ARSIPARIS PERTAMA	8	4.595.150
	ARSIPARIS MUDA	9	5.079.200
	ARSIPARIS MADYA	11	8.757.600
	ARSIPARIS UTAMA	13	10.936.000
13	ARSIPARIS TERAMPIL		
	ARSIPARIS PELAKSANA	6	3.510.400
	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	ARSIPARIS PENYELIA	8	4.595.150
14	PUSTAKAWAN AHLI		
	PUSTAKAWAN PERTAMA	8	4.595.150
	PUSTAKAWAN MUDA	9	5.079.200
	PUSTAKAWAN MADYA	11	8.757.600
	PUSTAKAWAN UTAMA	13	10.936.000
15	PUSTAKAWAN TERAMPIL		
	PUSTAKAWAN PELAKSANA	6	3.510.400
	PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PUSTAKAWAN PENYELIA	8	4.595.150
16	WIDYAIKWARA AHLI		
	WIDYAIKWARA PERTAMA	8	4.595.150
	WIDYAIKWARA MUDA	9	5.079.200
	WIDYAIKWARA MADYA	11	8.757.600
	WIDYAIKWARA UTAMA	13	10.936.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
17	PENELITI AHLI		
	PENELITI PERTAMA	8	4.595.150
	PENELITI MUDA	9	5.079.200
	PENELITI MADYA	11	8.757.600
	PENELITI UTAMA	13	10.936.000
18	AUDITOR AHLI		
	AUDITOR PERTAMA	8	4.595.150
	AUDITOR MUDA	9	5.079.200
	AUDITOR MADYA	11	8.757.600
	AUDITOR UTAMA	13	10.936.000
19	AUDITOR TERAMPIL		
	AUDITOR PELAKSANA	6	3.510.400
	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	AUDITOR PENYELIA	8	4.595.150
20	PRANATA KOMPUTER AHLI		
	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	4.595.150
	PRANATA KOMPUTER MUDA	9	5.079.200
	PRANATA KOMPUTER MADYA	11	8.757.600
	PRANATA KOMPUTER UTAMA	13	10.936.000
21	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL		
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6	3.510.400
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	4.595.150
22	ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL		
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA	6	3.510.400
	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA	7	3.915.950

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	LANJUTAN		
	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA	8	4.595.150
23	PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL		
	PRANATA SDM APARATUR TERAMPIL	6	3.510.400
	PRANATA SDM APARATUR MAHIR	7	3.915.950
	PRANATA SDM APARATUR PENYELIA	8	4.595.150
24	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI		
	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	9	5.079.200
	ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA	11	8.757.600
	ANALIS KEPEGAWAIAN UTAMA	13	10.936.000
25	ANALIS SDM APARATUR AHLI		
	ANALIS SDM APARATUR PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS SDM APARATUR MUDA	10	5.979.200
	ANALIS SDM APARATUR MADYA	12	9.896.000
	ANALIS SDM APARATUR UTAMA	14	17.064.000
26	PSIKOLOG KLINIS AHLI		
	PSIKOLOG KLINIS PERTAMA	8	4.595.150
	PSIKOLOG KLINIS MUDA	9	5.079.200
	PSIKOLOG KLINIS MADYA	11	8.757.600
	PSIKOLOG KLINIS UTAMA	13	10.936.000
27	PENERJEMAH AHLI		
	PENERJEMAH PERTAMA	8	4.595.150
	PENERJEMAH MUDA	9	5.079.200
	PENERJEMAH MADYA	11	8.757.600
	PENERJEMAH UTAMA	13	10.936.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
28	APOTEKER AHLI		
	APOTEKER PERTAMA	8	4.595.150
	APOTEKER MUDA	9	5.079.200
	APOTEKER MADYA	11	8.757.600
	APOTEKER UTAMA	13	10.936.000
29	ASISTEN APOTEKER AHLI		
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA	5	3.134.250
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6	3.510.400
	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	4.595.150
30	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI		
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA	8	4.595.150
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA	9	5.079.200
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA	11	8.757.600
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN UTAMA	13	10.936.000
31	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL		
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PEMULA	5	3.134.250
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA	6	3.510.400
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN LANJUTAN	7	3.915.950
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
32	FISIOTERAPIS AHLI		
	FISIOTERAPIS PERTAMA	8	4.595.150
	FISIOTERAPIS MUDA	9	5.079.200
	FISIOTERAPIS MADYA	11	8.757.600
	FISIOTERAPIS UTAMA	13	10.936.000
33	FISIOTERAPIS TERAMPIL		
	FISIOTERAPIS PELAKSANA	6	3.510.400
	FISIOTERAPIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	FISIOTERAPIS PENYELIA	8	4.595.150
34	RADIOGRAFER TERAMPIL		
	RADIOGRAFER PELAKSANA	6	3.510.400
	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	RADIOGRAFER PENYELIA	8	4.595.150
35	PEREKAM MEDIS		
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA	6	3.510.400
	PEREKAM MEDIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PEREKAM MEDIS PENYELIA	8	4.595.150
36	NUTRISIONIS AHLI		
	NUTRISIONIS PERTAMA	8	4.595.150
	NUTRISIONIS MUDA	9	5.079.200
	NUTRISIONIS MADYA	11	8.757.600
	NUTRISIONIS UTAMA	13	10.936.000
37	NUTRISIONIS TERAMPIL		
	NUTRISIONIS PELAKSANA	6	3.510.400
	NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	NUTRISIONIS PENYELIA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
38	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI		
	ADMINISTRATOR PERTAMA	8	4.595.150
	ADMINISTRATOR MUDA	9	5.079.200
	ADMINISTRATOR MADYA	11	8.757.600
	ADMINISTRATOR UTAMA	13	10.936.000
39	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI		
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI PERTAMA	8	4.595.150
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MUDA	9	5.079.200
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI MADYA	11	8.757.600
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI UTAMA	13	10.936.000
40	BIDAN AHLI		
	BIDAN PERTAMA	8	4.595.150
	BIDAN MUDA	9	5.079.200
	BIDAN MADYA	11	8.757.600
	BIDAN UTAMA	13	10.936.000
41	BIDAN TERAMPIL		
	BIDAN PELAKSANA PEMULA	5	3.134.250
	BIDAN PELAKSANA	6	3.510.400
	BIDAN PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	BIDAN PENYELIA	8	4.595.150
42	PENYULUH HUKUM AHLI		
	PENYULUH HUKUM PERTAMA	8	4.595.150
	PENYULUH HUKUM MUDA	9	5.079.200
	PENYULUH HUKUM MADYA	11	8.757.600
	PENYULUH HUKUM UTAMA	13	10.936.000
43	ANALIS KEIMIGRASIAN AHLI		
	ANALIS KEIMIGRASIAN PERTAMA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	ANALIS KEIMIGRASIAN MUDA	9	5.079.200
	ANALIS KEIMIGRASIAN MADYA	11	8.757.600
	ANALIS KEIMIGRASIAN UTAMA	13	10.936.000
44	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN TERAMPIL		
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PEMULA	5	3.134.250
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA	6	3.510.400
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	3.915.950
	PEMERIKSA KEIMIGRASIAN PENYELIA	8	4.595.150
45	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN AHLI		
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PERTAMA	8	4.595.150
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MUDA	9	5.079.200
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA	11	8.757.600
	PEMBIMBING KEMASYARAKATAN UTAMA	13	10.936.000
46	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN		
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PELAKSANA/TERAMPIL	6	3.510.400
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PELAKSANA LANJUTAN/MAHIR	7	3.915.950
	ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PENYELIA	8	4.595.150
47	DOSEN		
	ASISTEN AHLI	9	5.079.200
	LEKTOR	11	8.757.600
	LEKTOR KEPALA	13	10.936.000
	PROFESOR	15	19.280.000
48	PERENCANA AHLI		
	PERENCANA PERTAMA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PERENCANA MUDA	9	5.079.200
49	ANALIS KEBIJAKAN AHLI		
	ANALIS KEBIJAKAN PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS KEBIJAKAN MUDA	9	5.079.200
	ANALIS KEBIJAKAN MADYA	11	8.757.600
	ANALIS KEBIJAKAN UTAMA	13	10.936.000
50	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI		
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	8	4.595.150
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA	9	5.079.200
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA	11	8.757.600
51	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI		
	AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	8	4.595.150
	AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA	9	5.079.200
52	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI		
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERTAMA	8	4.595.150
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MUDA	10	5.979.200
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MADYA	12	9.896.000
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR UTAMA	14	17.064.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
53	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL		
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA	6	3.510.400
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA	8	4.595.150
54	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI		
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA	8	4.595.150
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA	9	5.079.200
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MADYA	11	8.757.600
55	ANALIS ANGGARAN AHLI		
	ANALIS ANGGARAN PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS ANGGARAN MUDA	10	5.979.200
	ANALIS ANGGARAN MADYA	12	9.896.000
56	ANALIS INTELIJEN AHLI		
	ANALIS INTELIJEN PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS INTELIJEN MUDA	9	5.079.200
57	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL		
	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA	6	3.510.400
	PENYULUH KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT PENYELIA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
58	ANALIS HUKUM AHLI		
	ANALIS HUKUM PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS HUKUM MUDA	9	5.079.200
	ANALIS HUKUM MADYA	11	8.757.600
	ANALIS HUKUM UTAMA	13	10.936.000
59	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI		
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN PERTAMA	8	4.595.150
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MUDA	9	5.079.200
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN MADYA	11	8.757.600
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN UTAMA	13	10.936.000
60	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI		
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN MUDA	10	5.979.200
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN MADYA	12	9.896.000
61	KURATOR KEPERDATAAN AHLI		
	KURATOR KEPERDATAAN PERTAMA	8	4.595.150
	KURATOR KEPERDATAAN MUDA	9	5.079.200
	KURATOR KEPERDATAAN MADYA	11	8.757.600
	KURATOR KEPERDATAAN UTAMA	13	10.936.000

E. DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN LAINNYA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI			
1	STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	16	27.577.500
2	STAF AHLI BIDANG EKONOMI	16	27.577.500
3	STAF AHLI BIDANG SOSIAL	16	27.577.500
4	STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	16	27.577.500
5	STAF AHLI BIDANG PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI	16	27.577.500
6	STAF KHUSUS MENTERI	16	27.577.500
ANGGOTA TEKNIS BHP			
1	ANGGOTA TEKNIS HUKUM	10	5.979.200
PELAKSANA			
1	BENDAHARA PENGELUARAN PUSAT	8	4.595.150
2	BENDAHARA PENERIMAAN PUSAT	8	4.595.150
3	ANALIS DATA INTELIJEN	7	3.915.950
4	ANALIS EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
5	ANALIS HUKUM	7	3.915.950
6	ANALIS JABATAN	7	3.915.950
7	ANALIS KEBUTUHAN DAN MANFAAT PELATIHAN	7	3.915.950
8	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL	7	3.915.950
9	ANALIS KELEMBAGAAN	7	3.915.950

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
10	ANALIS KERJASAMA	7	3.915.950
11	ANALIS KONSEPSI, PRAKARSA DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
12	ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN	7	3.915.950
13	ANALIS LAPORAN HASIL PENGAWASAN	7	3.915.950
14	ANALIS PELINDUNGAN HAK-HAK SIPIL DAN HAK ASASI MANUSIA	7	3.915.950
15	ANALIS PENDAPAT HUKUM DAN ADVOKASI	7	3.915.950
16	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	7	3.915.950
17	ANALIS PENGEMBANGAN HUKUM	7	3.915.950
18	ANALIS PENGEMBANGAN PEGAWAI	7	3.915.950
19	ANALIS PENYELESAIAN PEWARGANEGARAAN	7	3.915.950
20	ANALIS PERATURAN DAERAH	7	3.915.950
21	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	7	3.915.950
22	ANALIS PERENCANAAN, PENGGUNAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	7	3.915.950
23	ANALIS PERJANJIAN KERJA SAMA	7	3.915.950
24	ANALIS PERMASALAHAN HAM	7	3.915.950
25	ANALIS PERMASALAHAN HUKUM	7	3.915.950
26	ANALIS PERMOHONAN DESAIN INDUSTRI	7	3.915.950
27	ANALIS PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	7	3.915.950
28	ANALIS PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	7	3.915.950
29	ANALIS PERTIMBANGAN BANTUAN HUKUM	7	3.915.950
30	ANALIS PERTIMBANGAN EKSTRADISI	7	3.915.950
31	ANALIS PERTIMBANGAN HUKUM	7	3.915.950
32	ANALIS PROGRAM BIMBINGAN	7	3.915.950
33	ANALIS RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
34	ANALIS SIDIK JARI	7	3.915.950

35	ANALIS SISTEM APLIKASI DAN JARINGAN KOMPUTER	7	3.915.950
36	ANALIS SISTEM PROSEDUR DAN METODE KERJA	7	3.915.950
37	ANALIS STANDARDISASI SARANA KERJA	7	3.915.950
38	BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA	7	3.915.950
39	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA	7	3.915.950
40	KUSTODIAN BARANG MILIK NEGARA	7	3.915.950
41	NAHKODA	7	3.915.950
42	PENATA KEUANGAN	7	3.915.950
43	PENELAAH DOKUMEN FISIK PERSEROAN	7	3.915.950
44	PENELAAH KEIMIGRASIAN	7	3.915.950
45	PENELAAH RANCANGAN PERJANJIAN EKSTRADISI	7	3.915.950
46	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	7	3.915.950
47	PENERJEMAH BAHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
48	PENGEVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN	7	3.915.950
49	PENYULUH HAK ASASI MANUSIA	7	3.915.950
50	PENYUSUN ABSTRAKSI HUKUM	7	3.915.950
51	PENYUSUN BAHAN KERJA SAMA	7	3.915.950
52	PENYUSUN INFORMASI HUKUM	7	3.915.950
53	PENYUSUN KONSEP KETERANGAN PEMERINTAH	7	3.915.950
54	PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI	7	3.915.950
55	PENYUSUN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7	3.915.950
56	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	7	3.915.950
57	PENYUSUN LAPORAN PENGAWASAN	7	3.915.950
58	PENYUSUN MATERI BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH	7	3.915.950
59	PENYUSUN MATERI KEBIJAKAN	7	3.915.950

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
60	PENYUSUN MATERI PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7	3.915.950
61	PENYUSUN NASKAH AKADEMIK	7	3.915.950
62	PENYUSUN NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA	7	3.915.950
63	PENYUSUN PROGRAM	7	3.915.950
64	PENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	7	3.915.950
65	PENYUSUN TINDAK LANJUT DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	7	3.915.950
66	DOKUMENTALIS HUKUM	6	3.510.400
67	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEIMIGRASIAN	6	3.510.400
68	PENGELOLA ARSIP KEPEGAWAIAN	6	3.510.400
69	PENGELOLA BANTUAN HUKUM	6	3.510.400
70	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	3.510.400
71	PENGELOLA BENDA SITAAN NEGARA/BARANG RAMPASAN NEGARA	6	3.510.400
72	PENGELOLA DATA	6	3.510.400
73	PENGELOLA DATA KEIMIGRASIAN	6	3.510.400
74	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	6	3.510.400
75	PENGELOLA DATA PENGHARMONISASIAN	6	3.510.400
76	PENGELOLA HASIL KERJA	6	3.510.400
77	PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI	6	3.510.400
78	PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	3.510.400
79	PENGELOLA KEUANGAN	6	3.510.400
80	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	6	3.510.400
81	PENGELOLA PEMBINAAN BANTUAN	6	3.510.400
82	PENGELOLA PEMBINAAN INTELEKTUAL	6	3.510.400
83	PENGELOLA PEMBINAAN KEMANDIRIAN	6	3.510.400
84	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	6	3.510.400
85	PENGELOLA PEMBINAAN ROHANI	6	3.510.400

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
86	PENGELOLA PENERBITAN JURNAL LEGISLASI INDONESIA	6	3.510.400
87	PENGELOLA PENSIUN/PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	6	3.510.400
88	PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN	6	3.510.400
89	PENGELOLA PROGRAM GIZI	6	3.510.400
90	PENGELOLA RUMAH DETENSI	6	3.510.400
91	PENGELOLA SARANA KERJA	6	3.510.400
92	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	6	3.510.400
93	PENGELOLA TATA NASKAH	6	3.510.400
94	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI	6	3.510.400
95	PENGELOLA WEBSITE	6	3.510.400
96	PENGEVALUASI KEGIATAN PROGRAM	6	3.510.400
97	PENGOLAH APLIKASI SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	3.510.400
98	PENGOLAH BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	3.510.400
99	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN DOKUMENTASI EKSTRADISI	6	3.510.400
100	PENGOLAH BAHAN EVALUASI DAN PELAPORAN	6	3.510.400
101	PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	6	3.510.400
102	PENGOLAH BAHAN PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	6	3.510.400
103	PENGOLAH BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	6	3.510.400
104	PENGOLAH DAN PENYUSUN BAHAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	6	3.510.400

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
105	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA FASILITATOR BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	6	3.510.400
106	PENGOLAH DAN PENYUSUN DATA PELAYANAN KOMUNIKASI MASYARAKAT	6	3.510.400
107	PENGOLAH DAN PENYUSUN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN BIMBINGAN TEKNIS	6	3.510.400
108	PENGOLAH DATA ADMINISTRASI KOMISI BANDING	6	3.510.400
109	PENGOLAH DATA ANGGARAN	6	3.510.400
110	PENGOLAH DATA APLIKASI DAN DATABASE	6	3.510.400
111	PENGOLAH DATA DAKTILOSKOPI	6	3.510.400
112	PENGOLAH DATA DAN BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	6	3.510.400
113	PENGOLAH DATA DAN DOKUMENTASI HUKUM INTERNASIONAL UMUM	6	3.510.400
114	PENGOLAH DATA DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	6	3.510.400
115	PENGOLAH DATA EVALUASI DAN INFORMASI	6	3.510.400
116	PENGOLAH DATA HARTA PENINGGALAN	6	3.510.400
117	PENGOLAH DATA HASIL LAPORAN VERIFIKASI	6	3.510.400
118	PENGOLAH DATA HASIL PENELITIAN	6	3.510.400
119	PENGOLAH DATA HASIL PERTIMBANGAN DAN PENILAIAN PERLENGKAPAN	6	3.510.400
120	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG	6	3.510.400
121	PENGOLAH DATA INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	6	3.510.400

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
122	PENGOLAH DATA KEGIATAN ANTARBADAN INTERNASIONAL	6	3.510.400
123	PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN	6	3.510.400
124	PENGOLAH DATA KELEMBAGAAN	6	3.510.400
125	PENGOLAH DATA KERJASAMA	6	3.510.400
126	PENGOLAH DATA KESEHATAN	6	3.510.400
127	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI DESAIN INDUSTRI	6	3.510.400
128	PENGOLAH DATA KLASIFIKASI KELAS BARANG	6	3.510.400
129	PENGOLAH DATA KOMPILASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MASALAH DAN KASUS	6	3.510.400
130	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6	3.510.400
131	PENGOLAH DATA KOVENAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6	3.510.400
132	PENGOLAH DATA LAPORAN	6	3.510.400
133	PENGOLAH DATA LAPORAN ANALISA KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	6	3.510.400
134	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	6	3.510.400
135	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK KELOMPOK RENTAN	6	3.510.400
136	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK SIPIL DAN POLITIK	6	3.510.400
137	PENGOLAH DATA LAPORAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT	6	3.510.400
138	PENGOLAH DATA LAPORAN HASIL PENYALURAN PERLENGKAPAN	6	3.510.400

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
139	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	6	3.510.400
140	PENGOLAH DATA LAPORAN MATERI INFORMASI	6	3.510.400
141	PENGOLAH DATA LAPORAN METODOLOGI DISEMINASI HAK ASASI MANUSIA	6	3.510.400
142	PENGOLAH DATA LAPORAN PENILAIAN PERBENDAHARAAN	6	3.510.400
143	PENGOLAH DATA LAPORAN PRODUKSI DAN INFORMASI	6	3.510.400
144	PENGOLAH DATA LAPORAN SISTEM APLIKASI DAN DATABASE	6	3.510.400
145	PENGOLAH DATA PENGEMBANGAN JARINGAN BIMBINGAN TEKNIS HAK ASASI MANUSIA	6	3.510.400
146	PENGOLAH DATA PERENCANAAN DAN PROGRAM	6	3.510.400
147	PENGOLAH DATA WASIAT	6	3.510.400
148	PENGOLAH SAI	6	3.510.400
149	PENYUSUN BAHAN KOORDINASI DAN MONITORING PERSIDANGAN	6	3.510.400
150	PENYUSUN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA	6	3.510.400
151	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	6	3.510.400
152	PRANATA PASUKAN PENGAMAN DALAM	6	3.510.400
153	PRANATA SIDIK JARI	6	3.510.400
154	REGISTRATOR PEMASYARAKATAN	6	3.510.400
155	ROHANIAWAN AGAMA/PEMBIMBING AGAMA	6	3.510.400
156	SEKRETARIS PIMPINAN	6	3.510.400
157	TEKNISI JARINGAN	6	3.510.400
158	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	6	3.510.400
159	VERIFIKATOR	6	3.510.400

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
160	OPERATOR KOMPUTER	5	3.134.250
161	PEMBUAT DAFTAR GAJI	5	3.134.250
162	PEMELIHARA KANTOR	5	3.134.250
163	PEMERIKSA PELANGGARAN TATA TERTIB	5	3.134.250
164	PEMROSES BERKAS PERMOHONAN HARTA PENINGGALAN	5	3.134.250
165	PEMROSES DATA PENYIDIKAN DAN LITIGASI	5	3.134.250
166	PEMROSES IZIN ADVOKAT ASING	5	3.134.250
167	PEMROSES JAMINAN SOSIAL	5	3.134.250
168	PEMROSES LAYANAN HUKUM UMUM	5	3.134.250
169	PEMROSES LEGALISASI	5	3.134.250
170	PEMROSES MUTASI KEPEGAWAIAN	5	3.134.250
171	PEMROSES PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	5	3.134.250
172	PEMROSES PENETAPAN PENGHAPUSAN PERLENGKAPAN	5	3.134.250
173	PEMROSES PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	5	3.134.250
174	PEMROSES PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5	3.134.250
175	PEMROSES PENYELESAIAN SENGKETA, LITIGASI DAN PENYIDIKAN	5	3.134.250
176	PEMROSES PERMOHONAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5	3.134.250
177	PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	5	3.134.250
178	PEMROSES URUSAN ADMINISTRASI KOMISI BANDING	5	3.134.250
179	PENATAUSAHAAN	5	3.134.250
180	PENGADMINISTRASI BARANG DAN ATK	5	3.134.250
181	PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA	5	3.134.250

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
182	PENGADMINISTRASI DATA PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM	5	3.134.250
183	PENGADMINISTRASI JAMINAN FIDUSIA	5	3.134.250
184	PENGADMINISTRASI KEBUTUHAN DAN PEMBAKUAN PERLENGKAPAN	5	3.134.250
185	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	5	3.134.250
186	PENGADMINISTRASI LAYANAN KUNJUNGAN	5	3.134.250
187	PENGADMINISTRASI MANAJEMEN OUTSOURCING TEKNOLOGI INFORMASI	5	3.134.250
188	PENGADMINISTRASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
189	PENGADMINISTRASI PERJALANAN DINAS	5	3.134.250
190	PENGADMINISTRASI PERLENGKAPAN KEAMANAN	5	3.134.250
191	PENGADMINISTRASI PERPUSTAKAAN	5	3.134.250
192	PENGADMINISTRASI UMUM	5	3.134.250
193	PENGAMBIL SIDIK JARI	5	3.134.250
194	PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA	5	3.134.250
195	PENGELOLA ADMINISTRASI DIKLAT	5	3.134.250
196	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	5	3.134.250
197	PENGELOLA HASIL BELAJAR/EVALUASI PESERTA DIKLAT/PELATIHAN	5	3.134.250
198	PENGELOLA HUKUMAN DISIPLIN	5	3.134.250
199	PENGELOLA KENDARAAN DINAS	5	3.134.250
200	PENGHIMPUN BERITA	5	3.134.250
201	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	3.134.250
202	PENGHUBUNG ANTARLEMBAGA	5	3.134.250
203	PENGOLAH ADMINISTRASI PIMPINAN	5	3.134.250
204	PENGOLAH ARSIP DAN DOKUMENTASI	5	3.134.250
205	PENGOLAH ARSIP TERAAN	5	3.134.250
206	PENGOLAH DATA GAJI PEGAWAI	5	3.134.250
207	PENGOLAH DATA INVENTARIS	5	3.134.250

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
208	PENGOLAH DATA KEGIATAN PENGAMANAN	5	3.134.250
209	PENGOLAH DATA KENDARAAN OPERASIONAL	5	3.134.250
210	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMBUKUAN	5	3.134.250
211	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	5	3.134.250
212	PENGOLAH DATA LAPORAN PENGIRIMAN DAN PENGANGKUTAN PERLENGKAPAN	5	3.134.250
213	PENGOLAH DATA SIDIK JARI	5	3.134.250
214	PENJAGA PINTU UTAMA PEMASYARAKATAN	5	3.134.250
215	PENJAGA TAHANAN	5	3.134.250
216	PENYIAP BAHAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
217	PENYIAP BAHAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PERANCANG PERATURAN DAERAH	5	3.134.250
218	PENYIAP BAHAN DISTRIBUSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
219	PENYIAP BAHAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
220	PENYIAP BAHAN HUKUM TIDAK TERTULIS	5	3.134.250
221	PENYIAP BAHAN KEGIATAN PENYULUHAN HUKUM	5	3.134.250
222	PENYIAP BAHAN LAPORAN DAN EVALUASI	5	3.134.250
223	PENYIAP BAHAN LAPORAN HASIL PERTEMUAN ILMIAH	5	3.134.250
224	PENYIAP BAHAN LEGALISASI	5	3.134.250
225	PENYIAP BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI	5	3.134.250
226	PENYIAP BAHAN PEMBELAJARAN	5	3.134.250
227	PENYIAP BAHAN PENELITIAN HUKUM	5	3.134.250
228	PENYIAP BAHAN PENETAPAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL	5	3.134.250

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
229	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN JARINGAN INFORMASI HUKUM	5	3.134.250
230	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN METODE PENYULUHAN HUKUM	5	3.134.250
231	PENYIAP BAHAN PENGEMBANGAN OTOMASI	5	3.134.250
232	PENYIAP BAHAN PENGKAJIAN HUKUM	5	3.134.250
233	PENYIAP BAHAN PENYELENGGARA DIKLAT/PELATIHAN/PENYULUHAN	5	3.134.250
234	PENYIAP BAHAN PUBLIKASI	5	3.134.250
235	PENYIAP BAHAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5	3.134.250
236	PENYIAP DATA DAN BAHAN PENGHARMONISASIAN	5	3.134.250
237	PENYIAP DATA DAN PROGRAM LEGISLASI	5	3.134.250
238	PENYIAP DATA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	5	3.134.250
239	PENYIAP DOKUMENTASI NASKAH PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	5	3.134.250
240	PENYUSUN ARSIP DAN DOKUMENTASI	5	3.134.250
241	PETUGAS DOKUMENTASI (FOTOGRAFER)	5	3.134.250
242	PETUGAS PENGAMANAN DETENI	5	3.134.250
243	PETUGAS PROTOKOL	5	3.134.250
244	PETUGAS/ANGGOTA JAGA	5	3.134.250
245	POLISI KHUSUS KEIMIGRASIAN/PEMASYARAKATAN	5	3.134.250
246	SATUAN PENGAMAN TAHANAN/NARAPIDANA	5	3.134.250
247	TEKNISI	5	3.134.250
248	OPERATOR MESIN	4	2.985.000
249	OPERATOR TELEPON	4	2.985.000
250	PENGELOLA KELENGKAPAN DAN PERAWATAN NARAPIDANA/TAHANAN	4	2.985.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
251	PRAMU ACARA	4	2.985.000
252	TARUNA AKADEMI	4	2.985.000
253	AGENDARIS	3	2.898.000
254	CARAKA	3	2.898.000
255	PENGEMUDI	3	2.898.000
256	PETUGAS PENGGANDAAN	3	2.898.000

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 10 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN  
 KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN, SURAT KETERANGAN, DAN LAPORAN  
 RINCIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN

KOP SURAT

SURAT PERMOHONAN IZIN

(Tidak Masuk/Terlambat Masuk Kerja/Pulang Sebelum Waktunya/Tidak  
 Berada di Tempat Tugas/Tidak Melakukan Rekam Kehadiran)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/Gol : .....  
 Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa pada hari..... tanggal ..... saya  
 tidak masuk kerja/terlambat masuk kerja/pulang sebelum waktunya/tidak  
 berada di tempat tugas/tidak melakukan rekam kehadiran\*) karena  
 .....

....., ..... 20....

Persetujuan atasan langsung,

.....

.....

\*) coret yang tidak perlu.

B. FORMAT SURAT KETERANGAN

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor: .....

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : .....

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol : .....

Jabatan : .....

pada hari..... tanggal ..... tidak masuk kerja/terlambat masuk  
 kerja/pulang sebelum waktunya/tidak berada di tempat tugas/tidak  
 melakukan rekam kehadiran\*) karena ada keperluan penting dan mendesak  
 yaitu .....

....., ..... 20....

Atasan Langsung,

.....  
 NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu.

C. FORMAT LAPORAN RINCIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA  
PEGAWAI

KOP SURAT

LAPORAN RINCIAN PEMBAYARAN  
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

1. DATA PEGAWAI

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Gol. :
- d. Jabatan :

2. CAPAIAN NILAI SKP

- a. Nomor dan tanggal SKP :
- b. Periode : Januari – Juli/Juli – Desember (coret salah satu)
- c. Nilai SKP :

3. KETAATAN TERHADAP PENENTUAN KEHADIRAN

No	Uraian	Potongan per kejadian	Jumlah Kehadiran	Jumlah Potongan (Rp.)
a	Pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar dengan alasan yang sah.	....%		
b	Pegawai terlambat masuk kerja/kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan dan atau kantor pada jam kerja dengan alasan yang sah.	....%		
c	Pegawai tidak masuk kerja/kuliah/belajar tanpa alasan yang sah	....%		
d	Pegawai terlambat masuk kerja/	....%		

	kuliah/belajar atau pulang sebelum waktunya, atau meninggalkan pekerjaan, dan/atau kantor pada jam kerja tanpa alasan.			
	JUMLAH			

4. PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN CUTI

No	Uraian Cuti	Pembayaran Tunjangan Kinerja
1	(Uraikan cuti yang dilaksanakan)	(dibayarkan sejumlah ...% selama .... Bulan) sejumlah Rp..... setiap bulannya.

5. PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN CUTI

6.1.	Jumlah bruto	:	Rp.
6.2.	Penyesuaian atas capaian nilai SKP	:	Rp.
6.3.	Penyesuaian atas ketaatan terhadap ketentuan kehadiran	:	Rp.
6.4.	Penyesuaian atas pelaksanaan cuti	:	Rp.
	Jumlah Netto		Rp.

Tanggal : ..... 20...

PEJABAT YANG BERWENANG,

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY